

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam menggunakan teori social sebagaimana yang diungkapkan oleh Lewis A Coser.¹⁴ memiliki para meter yang jelas, guna menelaah sebuah karya para teoretisi sosial yaitu mengetahui latar belakang pribadi teoretisi social serta konteks intelektual dan kontek social, pada pondok pesantren tersebut.

Dalam mengembangkan teori sosial, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lewis A. Coser, penting untuk menetapkan parameter yang jelas dalam menganalisis sebuah karya para teoretisi sosial.¹⁵ Proses ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang latar belakang pribadi sang teoretisi, termasuk pengalaman hidup dan nilai-nilai yang memengaruhi pandangannya. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan konteks intelektual, seperti tradisi pemikiran dan arus intelektual yang dominan pada masanya, serta konteks sosial yang meliputi kondisi politik, ekonomi, dan budaya di mana teori tersebut dikembangkan. Dalam hal ini, penerapan teori sosial di lingkungan seperti pondok pesantren memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik unik institusi tersebut, termasuk struktur sosial, nilai-nilai religius, dan dinamika hubungan antarpersonal.

¹⁴ Lewis A. Coser, 'Social Conflict and the Theory of Social Change', *The British Journal of Sociology Is Currently Published by The London School of Economics and Political Science* 8, no. 3 (n.d.): 125.

¹⁵ Coser, L. A., *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. (New York: Harcourt Brace Jovanovich., 1971), 243." Dalam karyanya *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*, Lewis A. Coser menekankan pentingnya memahami karya para teoretisi sosial dengan mempertimbangkan latar belakang pribadi mereka serta konteks intelektual dan sosial yang memengaruhi pemikiran mereka. Coser berpendapat bahwa untuk menganalisis teori sosial secara komprehensif, kita memahami biografi teoretisi tersebut dan kondisi sosial serta intelektual pada masa mereka. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menilai bagaimana pengalaman pribadi dan konteks historis memengaruhi perkembangan teori mereka. Sebagai contoh, dalam menganalisis teori konflik yang dikemukakan oleh Coser, penting untuk memahami pengalamannya sebagai imigran Yahudi yang melarikan diri dari rezim Nazi di Jerman dan bagaimana hal ini memengaruhi pandangannya tentang konflik dan kohesi sosial. Dengan demikian, memahami konteks pribadi dan sosial teoretisi membantu kita dalam menafsirkan dan menerapkan teori mereka secara lebih akurat.

Dengan pendekatan holistik semacam ini, analisis terhadap teori sosial dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan relevan.

Kontek social yang menjadi latar belakang kemunculan suatu teori social yang digunakan ini adalah berupa perubahan social diakibatkan adanya PILEG 2024. Mengakibatkan situasi anomali rasionalitas tindakan sebagaimana yang ada di pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dan Bahrul Ulum Tambakberas, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

Konstelasi sosial yang melatarbelakangi munculnya teori sosial yang digunakan dalam kajian ini erat kaitannya dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi akibat pemilihan legislatif (pileg) 2024. Momentum politik seperti pileg memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada institusi pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren. Di dalam konteks ini, perubahan sosial yang dipicu oleh pileg tidak hanya berimplikasi pada pergeseran struktur sosial, tetapi juga menciptakan situasi anomali dalam rasionalitas tindakan individu dan kelompok. Hal ini terlihat nyata pada sejumlah pondok pesantren terkemuka di Jombang, Jawa Timur, seperti Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Bahrul Ulum Tambakberas, Darul Ulum Rejoso Peterongan, dan Tebuireng Jombang.¹⁶

Anomali rasionalitas tindakan yang dimaksud merujuk pada situasi di mana tindakan individu atau kelompok tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional semata, melainkan turut dipengaruhi pada faktor eksternal seperti tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam studi pondok pesantren, fenomena ini muncul akibat masuknya isu-isu politik yang sering kali membawa konsekuensi langsung terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat pesantren.¹⁷ Misalnya, santri dan pengurus pesantren yang sebelumnya fokus pada aktivitas pendidikan dan keagamaan mulai terlibat dalam diskusi dan kegiatan politik yang dipicu oleh isu-isu pileg.

¹⁶ Ubaidillah, M., 'Dinamika Sosial Pondok Pesantren Di Era Politik Praktis.', *Jurnal Sosiologi Islam* 15, no. 2 (n.d.): 117.

¹⁷ Arif, M. Z., 'Pengaruh Pileg Terhadap Transformasi Sosial Di Pondok Pesantren.', *Jurnal Pendidikan Islam*, 19, no. 1 (n.d.): 36.

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional pesantren dengan dinamika modern yang dihadirkan oleh konteks politik.

Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dan Bahrul Ulum Tambakberas, sebagai contoh, memiliki sejarah panjang dalam kontribusinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia.¹⁸ Namun, dalam konteks pileg 2024, kedua pesantren ini menghadapi tantangan baru berupa perubahan orientasi sebagian anggotanya terhadap isu-isu politik praktis.¹⁹ Begitu pula Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, yang dikenal dengan tradisi keilmuan Islamnya, kini turut merasakan dampak dari intensitas interaksi sosial politik di sekitarnya. Pesantren ini, yang sebelumnya menjadi pusat pendidikan berbasis nilai-nilai religius, kini berhadapan dengan dinamika baru yang mengharuskan mereka menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri.

Fenomena serupa terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, salah satu pesantren paling berpengaruh di Indonesia. Sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, Tebuireng menghadapi tekanan untuk menavigasi hubungan kompleks antara tradisi pesantren dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial akibat politik. Dalam situasi ini, anomali rasionalitas tindakan menjadi semakin nyata. Sebagian kelompok dalam pesantren cenderung mendukung partai atau kandidat tertentu berdasarkan loyalitas historis atau ideologis, sementara kelompok lain mencoba menjaga netralitas institusional.

Secara keseluruhan, fenomena yang terjadi di pesantren-pesantren ini menunjukkan bagaimana dinamika politik praktis dapat berdampak pada perubahan sosial di tingkat lokal. Anomali rasionalitas tindakan menjadi salah satu indikator penting dalam memahami bagaimana konteks sosial dan politik dapat memengaruhi institusi-institusi tradisional. Oleh karena itu, analisis teori sosial dalam konteks ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana struktur pesantren, nilai-nilai religius, dan dinamika politik saling berinteraksi untuk menciptakan

¹⁸ Mujib, A., *Pendidikan Islam Di Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya*. (Jakarta: Kencana, 2018), 97.

¹⁹ Ubaidillah, M., 'Dinamika Sosial Pondok Pesantren Di Era Politik Praktis.', 115.

perubahan sosial yang kompleks dan sering kali paradoksal. Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam merespons perubahan sosial di era modern.

Paradigma realitas social yang mengakibatkan disintegrasi social di pesantren dikarenakan nilai-nilai dan norma berkurang, akan tetapi baru sebagai penjabaran diri liberty, equality dan brother hood saja. Disinilah *state of the arts teori social* sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tidak berupa bantahan yang akan menjungkir balikkan teori atau temuan ilmuwan yang lain sebagaimana Karl Max menjungkir balikkan Carl Fredrik Hegel akan tetapi dapat pula sebagai koreksi perbaikan atas sejumlah variable teori atau temuan ilmuwan lain sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Robert King Merton terhadap Talcott Parson.²⁰

Paradigma realitas sosial yang mengarah pada disintegrasi sosial di pesantren merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Disintegrasi sosial ini sering kali disebabkan oleh melemahnya nilai-nilai dan norma yang sebelumnya menjadi landasan bagi komunitas pesantren. Dalam konteks ini, nilai-nilai tradisional mulai tergantikan oleh ide-ide modern seperti *liberty* (kebebasan), *equality* (kesetaraan), dan *brotherhood* (persaudaraan), yang meskipun memiliki potensi positif, belum sepenuhnya diterapkan secara holistik dalam kehidupan pesantren. Hal ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai lama yang dipertahankan dengan nilai-nilai baru yang mencoba diadopsi.²¹ Pada titik ini, penting untuk melihat kontribusi teori sosial sebagai landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memahami dan mengatasi persoalan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah gagasan bahwa teori sosial tidak berupa bantahan total terhadap sebuah teori sebelumnya, melainkan dapat menjadi bentuk koreksi atau

²⁰ Ramlan Surbakti, *Anatomi Dan Perkembangan Teori Sosial* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 24.

²¹ Parsons, T., *The Social System* (London: Routledge, 1951), 57.

pengayaan atas teori-teori yang telah ada. Seperti halnya Karl Marx yang menjungkirbalikkan pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel melalui materialisme historisnya, teori sosial juga dapat diambil sebagai dasar untuk memberikan kritik konstruktif terhadap kerangka pemikiran lain. Namun, pendekatan koreksi yang lebih moderat, seperti yang dilakukan oleh Robert King Merton terhadap teori fungsionalisme Talcott Parsons, dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif.²²

Robert K. Merton, dalam kritiknya terhadap Parsons, tidak menolak fungsionalisme secara keseluruhan, tetapi memperkenalkan konsep-konsep seperti *middle-range theory* dan *manifest* serta *latent functions*. Dengan cara ini, Merton memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam fungsionalisme struktural Parsons, yang cenderung terlalu makro dan deterministik, untuk memberikan fleksibilitas dan relevansi dalam menjelaskan fenomena sosial yang lebih spesifik. Pendekatan ini relevan dalam menganalisis disintegrasi sosial di pesantren, di mana konflik antara nilai tradisional dan modern membutuhkan penjelasan yang tidak hanya bersifat generalis tetapi juga kontekstual.²³

Dalam konteks pesantren, paradigma yang diusung oleh nilai-nilai modern seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan sebenarnya dapat dipadukan dengan nilai-nilai tradisional untuk membangun harmoni sosial yang lebih baik. Namun, implementasinya memerlukan adaptasi yang berhati-hati agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial yang lebih parah. Misalnya, kebebasan (*liberty*) perlu dimaknai dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai pesantren, sehingga tidak menciptakan kebebasan tanpa tanggung jawab. Kesetaraan (*equality*) juga diperhatikan dalam konteks hierarki yang khas dalam kehidupan pesantren, di mana hubungan antara kiai, santri, dan masyarakat sekitar tetap terjaga dengan baik. Di sinilah *state of the arts* teori sosial memainkan perannya. Teori sosial dapat menjadi alat untuk menjembatani konflik nilai dan memberikan solusi yang aplikatif bagi pesantren yang sedang mengalami

disintegrasi sosial. Pendekatan seperti koreksi yang dilakukan oleh Merton terhadap Parsons menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang tidak hanya melalui penolakan total, tetapi juga melalui perbaikan parsial terhadap teori-teori yang ada. Dengan cara ini, teori sosial dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan disintegrasi sosial di pesantren, sekaligus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sosial.²⁴

Dengan demikian dalam menyusun kerangka teoritis ini kami membagi jadi *grend theory*, *middle theory* dan *applied theory*²⁵. Sebagai penelusuran dalam berselancar di anatomi penelitian kami, yaitu :

- a. Rasionalitas tindakan politik, teori rasionalitas dalam konteks tindakan pilihan partai politik kiai pada lokus keempat pondok pesantren di Jombang.
- b. Peran kiai dalam partai politik, yakni fenomena dan dinamika politik kiai. Sekaligus sebagai studi pilihan budaya partai politik.
- c. Faktor-faktor penentu pilihan politik, faktor agama, ideologi, dan pragmatisme dalam tindakan partai politik.

Guna mengurai kerangka konseptual pada teori yang relevan sebagai pijakan pisau analisis dalam pilihan teori ini, maka bisa dibagi menjadi tiga:

- a. Grand Theory : Max Weber²⁶
- b. Middle Theory: Gabriel A. Almond.²⁷
- c. Applied Theory: Pierre Bourdieu.²⁸

²⁴ Marx, K., *Theses on Feuerbach.*, 1888.

²⁵ Bagong Suyanto, *Filsafat Sosial* (Malang: Aditya Media Publishing, 2013), 231.

²⁶ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, 123; Max Weber, *The Methodology of the Social Sciences*, *Traslated by Edward A. Shils* (Amerika: The Free Press Glecoce. Printed in the United States of America, 1949), 429.

²⁷ Stefanus Nindito, 'Fenomenologi Alfred Schutz ; Studi Tentang Kontruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial.', *Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2005): 94; Afif Syaiful Mahmudin, 'Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*. 5, no. 1 (2021): 34; Clark Moustakes., *Phenomenological Research Methods*. (India: SAGE Publications India pvt.Ltd. M-32 Market Greater Kailash, 1994); Muhammad Supraja dan Al akbar Nuruddin and Al Fred Schutz, *Pengarusutamaan Fenomenologi Dalam Tradisi Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2020), 221.

²⁸ Pierre Bourdieu., *Outline of A Theory of Practice*, (Inggris: Cambridge University Press, 1995), 442; Bierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, *Terj Dari Bahasa Prancis Oleh Gino Raymond & Matthew Adamason*, (Inggris: Polity Press, 2007), 281; Fauzi Fashri., *Penyingkapan Kuasa Simbolik; Apropriasi Refleksi Pemikiran Pierre Bourdieu*. (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), 211. Abdul Chalik. Revisiting the Power of kyai in Determining Indonesia Lokal Political Leader; A Case From Regent Election in Situbondo and gresik. *The Author(s) 2025 I. D. A. Nurhaeni et al. (eds.), Proceedings of the 1st Joint International Conference on Social and Political Sciences: Challenges and Opportunities in the Future (JICSPS 2023)*,

A. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Kerangka dalam bentuk alur pikiran atau bagan yang mendasari dilakukannya suatu pikiran peneliti dalam menyusun teori, kita perlu pijakan teori rasionalitas tindakan dari Max Weber yang mana tindakan seseorang pasti memiliki makna terhadap seperangkat konsep yang sifatnya empirik sebagai alat guna membantu serangkaian panjang bagi peneliti, membimbing, menangkap tentang data, sebagaimana teorinya Max Weber :

1. Rasionalitas Formal.
2. Rasionalitas Nilai
3. Rasionalitas Afektif.
4. Tradisional.

Tindakan kiai kita tempatkan sebagai Grand Theory. Sebagaimana dalam sebuah konsep dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, yang merujuk pada penjelasan yang abstrak dan umum tentang kehidupan, sosial, atau pengalaman manusia. Teori ini mencoba memahami realitas sosial melalui konsep-konsep utama yang saling terkait.

a. Rasionalitas formal kiai

Rasionalitas formal dalam konteks tindakan kiai terhadap pilihan politik merujuk pada pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi logis pertimbangan konsekuensial.²⁹ Dalam hal ini, kiai mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan politik, seperti ideologi partai politik, platform kebijakan, rekam jejak serta kandidat dan potensi dampak terhadap masyarakat.

Rasionalitas formal seorang kiai dalam konteks pilihan politik merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada

²⁹ Miftah Faridl., 'Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia.', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19, no. 2 (2003): 202."Rasionalitas formal dalam konteks tindakan kiai terhadap pilihan politik merujuk pada pendekatan pengambilan keputusan yang berlandaskan kalkulasi logis dan pertimbangan konsekuensial. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan kiai untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti manfaat dan risiko, dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam ranah politik. Kiai, yang sering kali memiliki peran sebagai patron di masyarakat, memanfaatkan pengaruh mereka untuk memberikan arahan politik yang tidak hanya selaras dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak praktisnya terhadap komunitas mereka. Dalam praktiknya, rasionalitas formal ini memungkinkan kiai untuk membuat keputusan politik yang terencana, seperti mendukung kandidat tertentu atau berafiliasi dengan partai politik tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan pesantren, kesejahteraan masyarakat santri, dan dinamika sosial-politik lokal. Dengan pendekatan ini, kiai mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan kebutuhan pragmatis dalam politik, memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya membawa manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung visi keberlanjutan sosial yang lebih".

kalkulasi logis dan pertimbangan konsekuensial. Dalam perspektif ini, seorang kiai tidak hanya memandang politik sebagai sekadar ajang kompetisi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan religius yang lebih besar. Rasionalitas formal ini terlihat dari bagaimana kiai mempertimbangkan sejumlah faktor relevan sebelum menentukan dukungannya terhadap suatu partai atau kandidat politik. Faktor-faktor tersebut meliputi ideologi partai politik, platform kebijakan, rekam jejak kandidat, serta potensi dampak kebijakan terhadap masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadi tanggung jawab moral seorang kiai.³⁰

Konteks ini mencerminkan bahwa keputusan politik seorang kiai tidak bersifat emosional atau sepenuhnya tradisional, tetapi melibatkan analisis sistematis terhadap situasi dan kondisi. Misalnya, ketika seorang kiai memilih untuk mendukung kandidat tertentu, keputusan tersebut sering kali didasarkan pada pertimbangan bagaimana kandidat tersebut dapat mendukung nilai-nilai Islam dan kepentingan umat.³¹ Selain itu, kiai juga mempertimbangkan dampak dari keputusan politik tersebut terhadap hubungan sosial di komunitas pesantren dan masyarakat luas. Dengan demikian, rasionalitas formal kiai mencakup aspek pragmatis dan moral dalam bingkai keputusan politik.³²

Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat dilihat dalam sejarah politik Indonesia, di mana banyak kiai terkemuka mengambil peran strategis dalam membangun aliansi politik. Contohnya adalah keterlibatan sejumlah kiai dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung calon presiden tertentu selama pemilu. Dukungan tersebut sering kali bukan hanya berdasarkan kedekatan ideologis, tetapi juga

³⁰ Weber, M., *He Theory of Social and Economic Organization* (New York: Free Press, 1947), 118.

³¹ Muzakki, A., “Kiai Dan Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pemilu.”, *Jurnal Islam Dan Politik* 5, no. 2 (2013): 37.

³² Rahmat, M., *Islam Dan Politik: Analisis Peran Kiai Dalam Pemilu*. (Bandung: Mizan, 2015), 47.

kalkulasi terhadap dampak kebijakan calon presiden tersebut terhadap pesantren dan komunitas Muslim.³³

Rasionalitas formal kiai juga mencerminkan kemampuan untuk menyeimbangkan tuntutan moral dan kepentingan pragmatis. Dalam konteks ini, kiai memastikan bahwa pilihan politiknya tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan komunitas Muslim secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang kiai cenderung memperhatikan isu-isu besar seperti kebijakan pendidikan, ekonomi, dan toleransi beragama, yang dianggap relevan bagi keberlangsungan umat.³⁴ Misalnya, dukungan terhadap partai politik yang memiliki komitmen pada pendidikan Islam sering kali menjadi salah satu kriteria utama bagi kiai dalam menentukan pilihan politiknya.³⁵

Dalam perspektif teori sosial, tindakan kiai yang didasarkan pada rasionalitas formal dapat dianalisis melalui pendekatan rasionalitas instrumental Max Weber. Weber menjelaskan bahwa rasionalitas formal adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tujuan dan sarana yang paling efisien untuk mencapainya.³⁶ Dalam konteks ini, pilihan politik kiai menjadi sebuah tindakan rasional yang mempertimbangkan efektivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam aspek religius maupun sosial.³⁷

Pendekatan rasionalitas formal ini dapat diwujudkan dalam beberapa langkah, identifikasi tujuan yaitu kiai terlebih dahulu perlu mengidentifikasi tujuan utama mereka dalam politik. Apakah mereka ingin mempromosikan nilai-nilai agama tertentu, memperjuangkan keadilan sosial, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³³ Bruinessen, M. V., *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. (Yogyakarta: LKiS, 1994), 88.

³⁴ Zaini Sudarto, 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif', *Jurnal Pendidikan* 01, no. 01 (2016): 25.

³⁵ Anwar, S., *Islam Dan Kekuasaan Politik Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2018), 77.

³⁶ Weber, Max., *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich, (Amerika serikat: University of California Press, 1978), 212.

³⁷ Giddens, A., *The Constitution of Society* (Cambridge: Polity Press, 1984), 96.

Selanjutnya dengan pengumpulan informasi dari kiai, sebanyak mungkin tentang berbagai partai politik, kandidat, dan isu-isu politik yang sedang dihadapi. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti media massa, diskusi dengan aktivis politik, dan penelitian akademis.

Analisis terhadap informasi, dimana setelah mengumpulkan informasi yang cukup, peneliti perlu menganalisisnya secara kritis untuk menilai mana yang paling konsisten dengan tujuan mereka. Dengan analisis ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kredibilitas sumber informasi, potensi bias, dan kemungkinan konsekuensi dari setiap pilihan. Pemilihan opsi ini didasarkan pada analisis informasi, kiai dapat memilih opsi yang mereka yakini paling sesuai dengan tujuan mereka. Pilihan ini mungkin berupa mendukung partai politik tertentu, memilih kandidat tertentu, atau mengadvokasi kebijakan tertentu.

Dalam analisis terhadap informasi, langkah kritis setelah pengumpulan informasi adalah menganalisisnya secara mendalam untuk menentukan relevansi dan konsistensinya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses analisis ini membutuhkan pendekatan yang sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti kredibilitas sumber informasi, potensi bias, dan kemungkinan konsekuensi dari setiap pilihan.³⁸ Analisis yang cermat memungkinkan peneliti atau pengambil keputusan, termasuk kiai, untuk memilih informasi yang valid dan relevan dari informasi yang tidak terpercaya atau kurang mendukung tujuan mereka. Dengan cara ini, keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat.³⁹

Dalam konteks politik, analisis terhadap informasi menjadi penting bagi seorang kiai yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya.⁴⁰ Seorang kiai tidak hanya bertindak sebagai pemimpin religius, tetapi juga sebagai figur strategis yang sering kali menjadi penentu arah politik komunitas Muslim.

³⁸ Weber, M., *The Theory of Social and Economic Organization*, New York, 1947.96.

³⁹ Muzakki, A., 'Kiai Dan Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pemilu', *Jurnal Islam Dan Politik*. 2013. 33.

⁴⁰ Rahmat, M., *Islam Dan Politik: Analisis Peran Kiai Dalam Pemilu.*, Bandung Mizan. 2015. 51.

Oleh karena itu, analisis informasi yang dilakukan oleh kiai mencakup evaluasi terhadap ideologi partai politik, integritas kandidat, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas. Misalnya, seorang kiai mungkin mempelajari manifesto partai politik tertentu untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakan yang diusulkan.⁴¹

Proses analisis ini tidak terlepas dari penilaian terhadap kredibilitas sumber informasi. Kredibilitas sumber menjadi faktor utama dalam memastikan validitas informasi yang digunakan untuk membuat keputusan.⁴² Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kiai juga mampu memilah informasi dari berbagai platform, termasuk media sosial, situs berita, dan laporan akademik. Informasi yang berasal dari sumber terpercaya, seperti jurnal akademik atau lembaga resmi, biasanya memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan informasi yang tidak diverifikasi dari media sosial.⁴³

Selain itu, kiai juga mempertimbangkan potensi bias dalam informasi yang diterima. Bias informasi dapat muncul dari berbagai faktor, seperti afiliasi politik sumber informasi atau interpretasi subyektif dari penulisnya.⁴⁴ Dalam hal ini, analisis yang cermat melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi bias dan mengevaluasi sejauh mana bias tersebut memengaruhi validitas informasi. Sebagai contoh, seorang kiai yang menerima informasi dari sumber yang jelas mendukung partai politik tertentu mampu membandingkannya dengan informasi dari sumber yang lebih netral untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif.⁴⁵

Setelah menganalisis informasi, kiai dapat memilih opsi yang diyakini paling sesuai dengan tujuan mereka. Pilihan ini mungkin berupa mendukung partai politik tertentu, memilih kandidat tertentu, atau

⁴¹ Anwar, S., *Islam Dan Kekuasaan Politik Di Indonesia.*, Jakarta Gramedia, 2018. 63.

⁴² Zaini, M., “Kiai Dan Rasionalitas Formal Dalam Pemilu Lokal.”, *Jurnal Sosiologi Islam*, 18, no. 1 (2020): 59.

⁴³ Bruinessen, M. V., *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta LkiS 1994*, 93.

⁴⁴ Giddens, A., *The Constitution of Society*, 110.

⁴⁵ Muzakki, A., ‘Kiai Dan Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pemilu.’, 36.

mengadvokasi kebijakan tertentu.⁴⁶ Misalnya, seorang kiai yang menilai bahwa sebuah partai politik memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan Islam mungkin memutuskan untuk mendukung partai tersebut. Dalam proses ini, keputusan kiai sering kali didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, seperti dampak kebijakan terhadap keberlangsungan pendidikan Islam atau kesejahteraan umat secara umum.⁴⁷

Selain faktor ideologis, analisis informasi juga mencakup evaluasi terhadap konsekuensi dari setiap pilihan.⁴⁸ Seorang kiai mempertimbangkan bagaimana keputusan politik mereka akan memengaruhi hubungan sosial di komunitas pesantren, dinamika politik lokal, dan persepsi masyarakat luas. Misalnya, dukungan terhadap kandidat tertentu dapat memperkuat hubungan dengan kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan kelompok lain.⁴⁹ Oleh karena itu, analisis informasi mencakup evaluasi terhadap risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.

Dalam perspektif teori sosial, proses analisis ini dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yang menekankan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan analisis untung-rugi untuk memaksimalkan manfaat.⁵⁰ Dalam konteks ini, kiai yang memilih mendukung kandidat tertentu melakukan analisis terhadap berbagai opsi dan memilih opsi yang diyakini memberikan manfaat terbesar bagi masyarakatnya.⁵¹ Namun, pilihan ini tidak selalu didasarkan pada kalkulasi material semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan religius yang menjadi panduan tindakan mereka.⁵²

⁴⁶ Turner, J. H., *The Structure of Sociological Theory*, 116.

⁴⁷ Rahmat, M., *Islam Dan Politik: Analisis Peran Kiai Dalam Pemilu.*, 60.

⁴⁸ Weber, M., *He Theory of Social and Economic Organization*, 205.

⁴⁹ Parsons, T., *The Social System*, 125.

⁵⁰ Coleman, J. S., *Foundations of Social Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 1990), 86.

⁵¹ Zaini, M., 'Kiai Dan Rasionalitas Formal Dalam Pemilu Lokal.', 87.

⁵² Bruinessen, M. V., *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.*, 105.

Contoh konkret dari proses analisis ini dapat dilihat pada peran kiai dalam pemilu di Indonesia. Sebagai pemimpin masyarakat, kiai sering kali menjadi rujukan bagi umat dalam menentukan pilihan politik.⁵³ Proses analisis informasi oleh kiai mencakup diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, studi terhadap kebijakan partai politik, dan penilaian terhadap integritas kandidat.⁵⁴ Misalnya, dalam pemilu legislatif, seorang kiai mungkin memutuskan untuk mendukung kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam di parlemen.⁵⁵ Keputusan ini didasarkan pada analisis informasi yang mencakup evaluasi terhadap program kerja kandidat, hubungan dengan komunitas Muslim, dan peluang untuk memenangkan pemilu.

Dengan demikian, analisis terhadap informasi menjadi langkah krusial dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks politik. Melalui analisis ini, kiai dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya konsisten dengan tujuan mereka, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas yang mereka pimpin.⁵⁶ Proses ini tidak hanya mencerminkan rasionalitas formal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menunjukkan komitmen kiai terhadap tanggung jawab moral dan sosial mereka.

Sebagaimana kiai di pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang rata-rata mendukung partai kebangkitan bangsa (PKB) sedangkan dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang mendukung partai politik persatuan pembangunan (PPP) karena platform kebijakannya sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Sedangkan kiai dari pondok pesantren Tebuireng Jombang memilih partai Gerindra, Sedangkan dari pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang memilih partai Demokrat,

⁵³ Azyumardi Azra, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praksis Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 45.

⁵⁴ Nurcholis Madjid, *Kiai Dan Politik: Peran Ulama Dalam Dinamika Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 88.

⁵⁵ Wahid, Abdurrahman., *Kyai, Perubahan Sosial, Dan Dinamika Politik Kekuasaan*, (Semarang: LKiS, 2017), 142.

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Demokrasi: Mengupas Peran Ulama Dalam Keputusan Politik*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2014), 78.

Sebagaimana dari semua pesantren tersebut memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan keadilan sosial. Bahkan kiai dari Mamba'ul Ma'arifpun juga mengadvokasi kebijakan dari pondok yang lainnya dikarenakan dia yakin kebijakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Jombang.

b. Rasionalitas nilai.

Rasionalitas formal mengacu pada proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada logika dan pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan memilih opsi yang paling optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵⁷

Rasionalitas formal adalah konsep yang menekankan pengambilan keputusan berdasarkan logika dan pertimbangan yang matang. Proses ini melibatkan evaluasi sistematis terhadap informasi yang tersedia untuk menentukan opsi terbaik dalam mencapai tujuan tertentu.⁵⁸ Pendekatan ini bersifat instrumental, karena berfokus pada cara paling efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁵⁹ Dalam teori sosial, rasionalitas formal sering dikaitkan dengan pandangan Max Weber, yang mengidentifikasi bahwa tindakan manusia sering kali diarahkan oleh kalkulasi untung-rugi yang rasional. Dalam konteks pengambilan keputusan, baik dalam skala individu maupun organisasi,

⁵⁷ Stanovich, K. E., & West, R. F., "Rationality and the Reflective Mind (Inggris: Oxford University Press, 2014), 215." In *Rationality and the Reflective Mind* by Stanovich and West (2014), the authors explore the dual-process framework of human cognition, distinguishing between two systems: System 1, which is fast, intuitive, and automatic, and System 2, which is slower, analytical, and deliberate. Rationality, as discussed in the book, is deeply tied to the functioning of System 2, as it involves reflective thinking, critical analysis, and the capacity to override impulsive responses from System 1. The authors emphasize two forms of rationality: instrumental rationality, which focuses on selecting actions that efficiently achieve goals, and epistemic rationality, which ensures that beliefs are aligned with available evidence. Rational thinking requires the integration of these forms, enabling individuals to process information systematically and make decisions that optimize outcomes. A key argument is that intelligence alone does not guarantee rationality. Rational thinking is seen as a distinct cognitive trait that involves metacognitive skills and the ability to evaluate and refine one's thought processes. This distinction underscores the importance of developing reflective mindsets to enhance decision-making, particularly in complex or high-stakes scenarios. The book offers a comprehensive framework for understanding how individuals can cultivate rationality beyond intuitive thinking.

⁵⁸ Weber, M., *He Theory of Social and Economic Organization*, 120.

⁵⁹ Simon, H. A, *Theories of Bounded Rationality. In Decision and Organization*. (Amsterdam: North-Holland, 1972), 176.

rasionalitas formal menjadi kerangka berpikir yang memungkinkan pelaku untuk menavigasi kompleksitas situasi dengan cara yang logis dan efisien.

Pengambilan keputusan berdasarkan rasionalitas formal seringkali mencakup berbagai tahap, termasuk pengumpulan data, analisis informasi, evaluasi opsi, dan akhirnya pemilihan solusi yang dianggap paling efektif. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, diikuti oleh pengumpulan data yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi yang tersedia. Dalam proses ini, kredibilitas sumber informasi memainkan peran penting. Keputusan yang baik hanya dapat dicapai jika informasi yang mendasarinya akurat dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, dalam konteks politik, seorang kiai yang hendak memilih dukungan terhadap kandidat tertentu akan mempelajari rekam jejak, visi-misi, dan potensi dampak kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat tersebut.⁶⁰

Selain itu, rasionalitas formal juga memperhatikan potensi risiko dan konsekuensi dari setiap keputusan. Dalam dunia yang semakin kompleks, keputusan sering kali tidak hanya memengaruhi tujuan langsung, tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang diperhitungkan.

⁶⁰ Soenarno, A. R. P., 'Analisis Pengaruh Kualitas Informasi Dan Kredibilitas Sumber Terhadap Kegunaan Informasi Dan Dampaknya Pada Adopsi Informasi.', *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, 23, no. 1 (2015): 8." Dalam artikel berjudul "*Analisis Pengaruh Kualitas Informasi dan Kredibilitas Sumber terhadap Kegunaan Informasi dan Dampaknya pada Adopsi Informasi*" yang diterbitkan di *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* (2015), Soenarno, A. R. P., mengeksplorasi hubungan antara kualitas informasi, kredibilitas sumber, dan dampaknya terhadap penggunaan serta adopsi informasi. Penelitian ini menyoroti bahwa kualitas informasi—termasuk aspek keakuratan, relevansi, dan kelengkapan—menentukan sejauh mana informasi dapat dianggap bermanfaat oleh pengguna. Selain itu, kredibilitas sumber informasi, yang meliputi reputasi, kompetensi, dan kepercayaan, berperan penting dalam memengaruhi keputusan individu untuk menerima dan mengadopsi informasi. Soenarno juga menekankan bahwa ketika informasi disajikan secara berkualitas dan didukung oleh sumber yang kredibel, pengguna cenderung lebih yakin dalam menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Dalam konteks adopsi informasi, faktor-faktor ini bekerja secara sinergis, memperkuat kepercayaan terhadap validitas informasi dan meningkatkan kemungkinan penerapannya dalam situasi nyata. Temuan ini relevan dalam berbagai bidang, termasuk pengambilan keputusan politik, bisnis, dan pendidikan, di mana validitas informasi memengaruhi hasil akhir.

Misalnya, sebuah keputusan yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek mungkin memiliki dampak negatif pada keberlanjutan komunitas atau organisasi dalam jangka panjang. Dalam konteks pesantren, seorang kiai mungkin mempertimbangkan apakah dukungan terhadap kebijakan tertentu akan memperkuat posisi pesantren atau justru merugikan hubungan dengan komunitas lainnya.

Rasionalitas formal tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan individu, tetapi juga diterapkan dalam organisasi. Dalam organisasi, seperti pesantren, pengambilan keputusan sering kali melibatkan banyak pihak, termasuk kiai, staf, dan komunitas. Dalam konteks ini, rasionalitas formal memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan tujuan bersama melalui diskusi yang terstruktur dan berbasis data. Proses ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam mengambil keputusan yang optimal.

Weber dalam teorinya menyatakan bahwa rasionalitas formal adalah karakteristik utama dari masyarakat modern.⁶¹ Ia menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan di era modern didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Hal ini berbeda dengan rasionalitas tradisional, yang cenderung berakar pada nilai-nilai budaya atau agama tanpa mempertimbangkan efektivitas praktis. Dalam konteks

⁶¹ Max Weber, *The Methodology of the Social Sciences*, *Translated by Edward A. Shils*, 34.” rasionalitas formal adalah salah satu karakteristik utama dari masyarakat modern. Konsep ini merujuk pada pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi logis, efisiensi, dan sistematisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Weber, masyarakat modern berbeda dari masyarakat tradisional karena adanya pergeseran dari tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional atau emosi menuju tindakan yang berorientasi pada hasil dan tujuan tertentu. Rasionalitas formal diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti ekonomi, hukum, birokrasi, dan pendidikan. Weber menekankan bahwa institusi modern, seperti birokrasi, dirancang untuk berfungsi secara efisien dengan aturan yang jelas dan hierarki yang terstruktur. Hal ini berbeda dengan masyarakat tradisional yang cenderung mengandalkan keputusan berdasarkan adat, kebiasaan, atau kharisma individu. Namun, Weber juga mencatat bahwa rasionalitas formal dapat membawa konsekuensi negatif, seperti "birokratisasi" yang berlebihan atau dehumanisasi, di mana manusia lebih dianggap sebagai bagian dari sistem dibandingkan sebagai individu yang memiliki nilai-nilai pribadi. Dengan demikian, rasionalitas formal menjadi landasan dalam memahami transformasi sosial menuju modernitas.

pesantren, perbedaan ini menjadi jelas ketika seorang kiai menghadapi tantangan modern, seperti politik dan ekonomi, yang menuntut pendekatan berbasis data dan logika, dibandingkan hanya bergantung pada tradisi.

Namun, meskipun rasionalitas formal menawarkan pendekatan yang efisien dan logis, tidak jarang terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional. Dalam konteks pesantren, keputusan yang sepenuhnya berbasis rasionalitas formal dapat berbenturan dengan norma-norma keagamaan atau budaya yang dipegang teguh oleh komunitas. Oleh karena itu, penting bagi kiai atau pengambil keputusan lainnya untuk mengintegrasikan rasionalitas formal dengan nilai-nilai lokal, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya rasional tetapi juga relevan secara budaya.

Salah satu tantangan dalam menerapkan rasionalitas formal adalah keberadaan bias dalam pengambilan keputusan. Bias dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk afiliasi politik, preferensi pribadi, atau interpretasi yang tidak akurat terhadap data. Untuk mengatasi hal ini, pengambil keputusan memastikan bahwa analisis mereka bebas dari bias sejauh mungkin, misalnya dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber dan melakukan verifikasi secara independen. Dalam konteks politik, misalnya, seorang kiai yang mendukung kandidat tertentu mampu membedakan antara informasi yang valid dan propaganda yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politiknya.

Rasionalitas formal juga relevan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi.⁶² Dalam manajemen keuangan pesantren,

⁶² Weber, Max., *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich, 1978, 249.” Rasionalitas formal memiliki relevansi yang signifikan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, karena pendekatan ini menekankan efisiensi, logika, dan optimalisasi dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ekonomi, rasionalitas formal digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan analisis mendalam terhadap manfaat dan biaya, serta pertimbangan terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, dalam investasi bisnis, pengusaha menggunakan rasionalitas formal untuk mengevaluasi potensi keuntungan dari berbagai opsi, seperti memilih proyek dengan nilai *return on investment* (ROI) tertinggi. Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya publik, pemerintah sering mengadopsi pendekatan rasionalitas formal untuk merancang kebijakan yang memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Contohnya adalah penyusunan

misalnya, keputusan untuk mengalokasikan sumber daya tertentu sering kali didasarkan pada kalkulasi manfaat dan biaya. Seorang kiai yang memutuskan untuk berinvestasi dalam program pendidikan tertentu mungkin mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan santri dan kesejahteraan pesantren secara keseluruhan. Dengan pendekatan rasionalitas formal, keputusan ekonomi menjadi lebih terarah dan transparan, sehingga meminimalkan risiko kerugian.

Selain Weber, banyak pemikir lain yang telah mengembangkan konsep rasionalitas formal, termasuk Herbert Simon dengan teori *bounded rationality*-nya.⁶³ Simon menyatakan bahwa dalam praktiknya, rasionalitas formal sering kali dibatasi oleh keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif manusia. Dalam konteks ini, pengambil keputusan sering kali tidak mampu mengevaluasi semua opsi yang tersedia secara menyeluruh dan puas dengan solusi yang "cukup baik" daripada yang optimal. Konsep ini relevan bagi kiai atau pemimpin pesantren, yang sering kali mengambil keputusan dalam

anggaran negara, di mana alokasi dana difokuskan pada sektor yang memberikan manfaat terbesar, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Namun, penerapan rasionalitas formal di bidang ekonomi juga memiliki tantangan. Faktor-faktor seperti ketidakpastian pasar, keterbatasan data, dan potensi bias dalam pengambilan keputusan dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, penggunaan rasionalitas formal sering dilengkapi dengan model prediktif dan simulasi untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan akurasi keputusan ekonomi. Hal ini menjadikan rasionalitas formal sebagai kerangka kerja penting dalam pengambilan keputusan ekonomi modern.

⁶³ Simon, H. A, *Theories of Bounded Rationality. In Decision and Organization.*, 367.” konsep *bounded rationality* untuk menggambarkan keterbatasan dalam kemampuan manusia membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Menurut Simon, meskipun manusia cenderung berusaha membuat keputusan yang rasional, kemampuan mereka dibatasi oleh tiga faktor utama: informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, keterbatasan kognitif dalam memproses informasi, dan waktu yang terbatas untuk menganalisis dan membuat keputusan. Dalam situasi ini, manusia tidak selalu dapat mengevaluasi semua opsi yang tersedia secara optimal. Sebagai alternatif, Simon menjelaskan bahwa manusia sering kali menggunakan pendekatan yang ia sebut *satisficing* mengambil keputusan yang cukup memadai atau "cukup baik" daripada mencari keputusan yang benar-benar optimal. Konsep ini relevan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, ekonomi, dan organisasi, di mana pengambil keputusan bekerja dengan sumber daya yang terbatas. *Bounded rationality* juga menjelaskan mengapa manusia sering kali menggunakan heuristik, atau aturan praktis, untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Simon menunjukkan bahwa teori ini lebih realistis daripada asumsi rasionalitas penuh yang sering digunakan dalam teori ekonomi tradisional, menjadikannya landasan penting dalam studi perilaku organisasi dan pengambilan keputusan.

situasi yang penuh keterbatasan, seperti waktu yang mendesak atau kurangnya data yang lengkap.

Rasionalitas formal juga memainkan peran penting dalam membangun strategi organisasi. Dalam pesantren, misalnya, perencanaan program pendidikan atau pengelolaan sumber daya manusia sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas formal. Keputusan untuk memperluas fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal semuanya memerlukan analisis yang cermat terhadap manfaat dan biaya yang terkait. Dengan pendekatan ini, pesantren dapat memastikan bahwa sumber daya mereka digunakan secara optimal untuk mendukung visi dan misi organisasi.

Dalam konteks tindakan kiai terhadap pilihan politik, rasionalitas formal dapat diartikan sebagai sebuah pertimbangan matang. Kiai mempertimbangkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi sebelum memutuskan pilihan politiknya.⁶⁴ Faktor-faktor ini dapat mencakup platform dan kebijakan partai politik, rekam jejak calon pemimpin, serta potensi dampak dari berbagai pilihan politik terhadap masyarakat. Analisis informasi kiai mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang kredibel, seperti media massa, pakar politik, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi politik dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Penilaian konsekuensi, kiai mempertimbangkan konsekuensi potensial dari berbagai pilihan politik yang ada. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

⁶⁴ Mohammad Rosyid, *Pengaruh Faktor Sosial, Politik, Dan Ekonomi Dalam Keputusan Politik Kiai*, (Surabaya: LKiS, 2014), 89." Dalam konteks tindakan kiai terhadap pilihan politik, rasionalitas formal mengacu pada proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang matang dan terstruktur. Kiai tidak hanya mengikuti naluri atau pengaruh eksternal, tetapi mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti faktor politik, sosial, dan ekonomi. Keputusan politik yang diambil relevan dengan kebutuhan umat dan komunitas yang dipimpin, serta tidak hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjangnya. Dengan demikian, rasionalitas formal mencerminkan sikap kritis dan bertanggung jawab kiai dalam memilih kandidat atau kebijakan politik yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Keputusan yang objektif, kiai berusaha untuk membuat keputusan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keputusan mereka didasarkan pada apa yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan. Komunikasi yang jelas, Kiai menjelaskan alasan di balik pilihan politik mereka kepada masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.⁶⁵

Seorang kiai mungkin mempertimbangkan platform dan kebijakan partai politik yang berbeda sebelum memutuskan untuk mendukung salah satu dari mereka. Seorang kiai mungkin menganalisis rekam jejak calon pemimpin sebelum memutuskan untuk mendukung mereka dalam pemilu. Seorang kiai mungkin mempertimbangkan potensi dampak dari berbagai kebijakan ekonomi sebelum memberikan pendapatnya tentang kebijakan tersebut. Seorang kiai mungkin berusaha untuk tetap objektif dalam penilaiannya terhadap berbagai isu politik, meskipun mereka mungkin memiliki preferensi pribadi. Seorang kiai mungkin menjelaskan alasan di balik pilihan politik mereka kepada masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung keputusan mereka.

⁶⁵ Mushthofa, Khoirul., 'Peran Kiai Dalam Partisipasi Politik Masyarakat.', *Jurnal Studi Islam Dan Politik*, 2019, 12." Keputusan yang objektif merupakan prinsip utama yang dipegang oleh kiai dalam menjalankan peran sosial dan politik mereka. Dalam konteks ini, kiai berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka memprioritaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang daripada keuntungan sesaat. Sebagai tokoh panutan, objektivitas kiai menjadi penting untuk menjaga integritas moral dan spiritual mereka, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai Islam dan keadilan. Selain itu, komunikasi yang jelas menjadi aspek kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pilihan politik kiai. Dengan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti mengenai alasan di balik keputusan mereka, kiai membantu masyarakat memahami konteks dan pertimbangan yang mendasari pilihan tersebut. Pendekatan ini juga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman atau konflik, karena masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kejelasan komunikasi ini mencerminkan transparansi, yang merupakan elemen penting dalam kepemimpinan yang efektif. Dengan begitu, kiai tidak hanya memperkuat dukungan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan mereka.

Pada akhirnya, rasionalitas formal merupakan alat yang dapat membantu kiai membuat keputusan politik yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan memilih opsi yang paling optimal, kiai dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik.

c. Afektif.

Afektif dalam konteks tindakan kiai terhadap pilihan politik merujuk pada pengaruh emosional dan psikologis yang ditimbulkan oleh kiai terhadap para pengikutnya dalam menentukan pilihan politik mereka. Pengaruh afektif ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti, Kharisma dan ketokohan kiai. Kiai yang memiliki karisma dan ketokohan yang kuat dapat menarik pengikut dan memicu rasa hormat dan kepercayaan di antara mereka. Kiai yang dihormati dan dipercaya lebih likely untuk dapat memengaruhi pilihan politik pengikutnya.⁶⁶

Pengajaran dan khotbah, Kiai dapat menggunakan pengajaran dan khotbah mereka untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada pengikutnya. Pesan-pesan ini dapat berupa dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu, atau nasihat tentang bagaimana memilih pemimpin yang ideal.

Doa dan ritual keagamaan yang diiringi dengan pesan-pesan politik. Doa dan ritual ini dapat membangkitkan rasa emosional dan spiritual pengikut, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh pesan-pesan politik yang disampaikan.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad, Mansur., 'Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 3, no. 2 (2015): 60.

⁶⁷ Wahid, Abdurrahman., *Kyai, Perubahan Sosial, Dan Dinamika Politik Kekuasaan*, 12." Doa dan ritual keagamaan sering kali digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik dengan cara yang halus namun efektif. Dalam banyak konteks, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, para pemimpin agama, seperti kiai atau ulama, menggunakan doa dan ritual sebagai saluran untuk memengaruhi opini publik. Melalui doa yang mengandung harapan akan kesejahteraan, keadilan, atau kedamaian, pesan-pesan politik dapat disisipkan tanpa secara langsung membahas politik. Ritual keagamaan ini mampu membangkitkan rasa emosional dan spiritual yang mendalam di kalangan pengikutnya, sehingga mereka cenderung lebih mudah menerima dan mendukung pesan yang disampaikan. Dalam konteks ini, doa tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi dengan Tuhan, tetapi juga sebagai alat mobilisasi sosial. Dengan menghubungkan pesan politik dengan keyakinan agama yang sudah diterima oleh masyarakat, pesan tersebut menjadi lebih kuat dan sulit untuk ditolak, karena menyentuh dimensi emosional dan moral para pengikutnya. Oleh karena itu,

Kiai sering kali memiliki jaringan sosial dan komunitas yang kuat dengan pengikutnya. Jaringan ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan pesan politik kepada pengikut secara lebih efektif.

Penting untuk dicatat bahwa pengaruh afektif kiai terhadap pilihan politik tidak selalu bersifat langsung atau eksplisit. Kiai mungkin tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu, tetapi pesan-pesan dan tindakan mereka dapat tetap diinterpretasikan oleh pengikut sebagai dukungan terhadap pihak tertentu.

Kiai yang memimpin sebuah organisasi keagamaan mungkin akan dapat mengarahkan para anggotanya untuk memilih partai politik tertentu dalam pemilihan umum. Kiai yang memiliki pengaruh besar di media sosial mungkin akan dapat menggunakan platformnya untuk menyebarkan pesan-pesan politik kepada pengikutnya.⁶⁸

Pengaruh afektif kiai terhadap pilihan politik adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Kiai memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk memengaruhi pilihan politik pengikutnya.

d. Tradisional.

Dalam pengertian tradisional, tindakan kiai terhadap pilihan politik memiliki beberapa aspek penting:

i. Pengaruh moral dan spiritual.

Kiai, sebagai pemimpin agama dan panutan moral, memiliki pengaruh besar terhadap komunitasnya. Nasihat dan arahan mereka dalam ranah politik seringkali diterima dengan hormat dan diikuti oleh para pengikutnya.

pemanfaatan doa dan ritual sebagai sarana politik menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama dan politik dalam kehidupan sosial.”

⁶⁸ Avant Garde, “Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik,” 9, no. 1 (2021): 76.

ii. Panduan nilai-nilai agama.

Kiai berperan dalam menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam konteks politik. Mereka memberikan arahan moral dan spiritual tentang bagaimana umat Islam berpartisipasi dalam politik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama.

iii. Mobilisasi politik.

Kiai tradisional memiliki kemampuan untuk memobilisasi pengikutnya untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu. Dukungan ini bisa melalui berbagai cara, seperti ceramah, doa bersama, atau bahkan instruksi langsung.

iv. Peran sebagai penengah.

Kiai juga dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan politik. Mereka dapat membantu menyelesaikan konflik dan mempromosikan dialog antar kelompok yang berbeda.

v. Mempertahankan stabilitas sosial.

Kiai tradisional seringkali dilihat sebagai penjaga stabilitas sosial. Mereka dapat membantu meredakan ketegangan dan mencegah konflik kekerasan yang terkait dengan politik.

Keterlibatan politik kiai tradisional bisa bervariasi. Ada kiai yang memilih untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis, sementara yang lain lebih aktif dalam mendukung kandidat atau partai politik tertentu. Peran kiai dalam politik juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada. Dalam beberapa kasus, kiai mungkin merasa perlu untuk mengambil peran yang lebih aktif untuk melindungi kepentingan komunitas mereka. Seiring waktu, peran kiai dalam politik bisa berubah. Generasi muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kiai terlibat dalam politik.⁶⁹

B. Pengembangan Teori Alfred Schutz terhadap Motif Tindakan

Alfred Schutz mengembangkan teori fenomenologi untuk menjelaskan bagaimana individu membangun makna melalui pengalaman

⁶⁹ Nasution, Ahmad., "Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional", *Sosiohumaniora*, 18, no. 3 (2016): 248.

subjektif mereka. Dalam konteks tindakan sosial, Schutz menyarankan bahwa motif tindakan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan cara yang rasional atau objektif. Sebaliknya, motif tersebut dilihat dalam konteks pengalaman hidup individu, yang Schutz sebut sebagai *Lebenswelt* (dunia hidup), sebuah dunia subjektif yang dibentuk oleh interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari. Dalam *Lebenswelt* ini, individu menginterpretasikan dan memberi makna pada tindakan mereka, yang selanjutnya membentuk realitas sosial mereka sendiri. Dengan demikian, pemahaman terhadap motif tindakan sosial mencakup pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial yang mereka jalani, bukan hanya merujuk pada rasionalitas yang bersifat objektif.⁷⁰

Menurut Schutz, terdapat dua kategori utama dalam motif tindakan yang relevan dalam konteks sosial: *Pertama*, Motif Diri (Self-Motives), yang timbul dari pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri dalam dunia sosial. Dalam hal ini, tindakan seseorang sering kali dipengaruhi oleh bagaimana mereka memaknai peran sosial mereka atau bagaimana mereka ingin dipersepsikan oleh orang lain. *Kedua*, Motif Sosial (Social Motives), yang lebih terkait dengan bagaimana individu memahami harapan sosial, norma, dan nilai dalam suatu komunitas. Tindakan yang dilakukan didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi atau memenuhi harapan sosial, yang sering kali bersifat tidak langsung atau bahkan tidak disadari oleh individu itu sendiri.⁷¹

Selain itu, motif tindakan juga dapat dilihat dalam konteks teori psikologis dan sosiologis lain yang memperkaya pemahaman tentang tindakan sosial. Misalnya, dalam teori *self-determination* yang

⁷⁰ Schutz, A., *The Phenomenology of the Social World* (Northwestern University Press, 1967), 34.

⁷¹ Schutz, A., 45.' In his work *The Phenomenology of the Social World*, Alfred Schutz outlines two primary categories of motives relevant to social action. The first category, Self-Motives, refers to motivations that arise from an individual's understanding of themselves within the social world. A person's actions are often influenced by how they interpret their own social roles or how they wish to be perceived by others. This subjective understanding of oneself guides behavior, often aligning with personal identity and self-image. The second category, Social Motives, is concerned with how an individual comprehends the social expectations, norms, and values within their community. Actions driven by social motives are often aimed at adapting to these expectations or fulfilling societal roles, and these motivations may not always be fully conscious. They are frequently influenced by collective understandings of acceptable behavior. Together, these two categories offer a richer view of the complexities underlying human action in a social context

dikembangkan oleh Deci dan Ryan (2000), individu bertindak berdasarkan kebutuhan dasar mereka untuk otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Dalam hal ini, motif tindakan tidak hanya dipengaruhi oleh harapan sosial eksternal, tetapi juga oleh kebutuhan internal individu untuk mencapai pemenuhan diri dan kebahagiaan.⁷² Sementara itu, Bourdieu (1990) memperkenalkan konsep *habitus*, yang merujuk pada struktur mental dan fisik yang dibentuk oleh pengalaman sosial individu. Bourdieu menekankan bahwa tindakan sosial seseorang sering kali didorong oleh kondisi yang telah terinternalisasi melalui pengalaman sosial sebelumnya, yang membentuk cara individu memahami dan bertindak dalam konteks sosial mereka.⁷³

Menurut Alfred Schutz, motif tindakan sosial, termasuk dalam konteks pilihan politik, dipahami melalui pengalaman subjektif individu, yang dibentuk oleh *Lebenswelt* mereka dunia hidup yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari. Dalam kasus kiai di Pondok Pesantren Jombang, pilihan partai politik yang mereka ambil mungkin dipengaruhi oleh bagaimana mereka menginterpretasikan dan memberi makna terhadap peran mereka sebagai pemimpin agama, tokoh masyarakat, serta pendidik dalam konteks sosial mereka. *Motif Diri* (Self- Motives)

⁷² Deci, E. L., & Ryan, R. M., 'The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior', *Psychological Inquiry* 11, no. 4 (2000): 228." In their self-determination theory, Deci and Ryan (2000) argue that human actions are driven not only by external social expectations but also by intrinsic psychological needs. They identify three core needs: autonomy, competence, and relatedness. Autonomy refers to the need to feel in control of one's own actions and decisions; competence involves the need to feel capable and effective in one's activities; and relatedness pertains to the desire to feel connected and valued by others. According to this theory, actions are motivated by the fulfillment of these needs, which are essential for personal growth, well-being, and happiness. Rather than being solely influenced by external pressures or rewards, individuals are driven by the internal need for self-fulfillment and connection with others. This framework provides a broader understanding of social action by integrating both external and internal motivators that guide human behavior".

⁷³ Bourdieu, P., *The Logic of Practice*. (Stanford University Press, 1990), 65." Bourdieu (1990) introduced the concept of *habitus*, which refers to the deeply ingrained mental and physical structures shaped by an individual's social experiences. *Habitus* encompasses the dispositions, beliefs, and behaviors that are developed over time through one's socialization and interactions within a given social context. Bourdieu emphasized that social actions are often driven by conditions that have been internalized through past social experiences, shaping how individuals understand and act in their social world. These dispositions are not consciously controlled but are rather habitual, influencing behavior in ways that align with social norms and expectations. Thus, *habitus* provides a framework for understanding how individuals' actions are not only influenced by external circumstances but are also guided by an internalized set of norms and practices that reflect their social history and position

kiai terkait dengan bagaimana mereka ingin dipersepsikan oleh masyarakat, terutama dalam hal hubungan mereka dengan otoritas politik dan agama. Sementara itu, motif *Sosial* (Social Motives) dapat muncul dalam bagaimana kiai berusaha memenuhi harapan sosial dan norma-norma yang ada di komunitas pesantren atau masyarakat sekitar mereka, yang mengarahkan mereka untuk membuat pilihan politik yang dianggap sesuai dengan ekspektasi kelompok sosial mereka.

Teori *self-determination* dari Deci dan Ryan juga relevan untuk memahami motif tindakan para kiai. Dalam hal ini, pilihan politik mereka dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Misalnya, para kiai merasa bahwa memilih partai politik tertentu akan memberikan mereka lebih banyak kebebasan dalam menentukan arah pendidikan atau dakwah mereka, mereka merasa bahwa dukungan terhadap partai tertentu meningkatkan kemampuan mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai sosial yang mereka yakini. konsep *habitus* yang diperkenalkan oleh Bourdieu menjelaskan bagaimana tindakan kiai dalam memilih partai politik juga dipengaruhi oleh kondisi yang telah terinternalisasi dalam struktur mental mereka melalui pengalaman sosial sebelumnya. Sebagai individu yang telah lama terlibat dalam tradisi pesantren, kiai dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma yang telah terinternalisasi dalam komunitas mereka, yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak dalam menghadapi dinamika politik. *Habitus* ini membentuk pemahaman mereka tentang dunia politik dan memberikan mereka pola tindakan tertentu dalam memilih partai politik.

Perbandingan teori tindakan sosial Max Weber dan teori fenomenologi Alfred Schutz dalam kaitannya dengan pilihan politik Kiai di Jombang Jawa Timur

Teori	Tipe Tindakan Sosial Max Weber	Motif Alfred Schutz	Relevansi terhadap Pilihan Politik Kiai
Tindakan Rasional	Rasionalitas Formal, Tindakan yang didorong oleh efisiensi dan tujuan yang terorganisir.	Motif Diri, Motif yang muncul dari pemahaman diri dalam dunia sosial.	Kiai membuat pilihan politik berdasarkan tujuan strategis atau efisiensi, seperti memperoleh

			pengaruh politik untuk pesantren.
Tindakan Berbasis Nilai	Rasionalitas Nilai Tindakan yang didorong oleh keyakinan terhadap nilai atau prinsip, terlepas dari hasilnya.	Motif Sosial Tindakan yang didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi harapan sosial, norma, atau nilai dalam komunitas.	Kiai memilih partai politik yang sejalan dengan nilai agama atau sosial, dipengaruhi oleh tekanan sosial atau prinsip internal yang diyakini.
Tindakan Berdasarkan Emosi	Tindakan Afektif Tindakan yang dipengaruhi oleh respon emosional.	Motif Diri Respon emosional terhadap situasi sosial yang mempengaruhi keputusan.	Pilihan politik Kiai dapat dipengaruhi oleh pengalaman emosional atau keterikatan pribadi terhadap partai atau tokoh tertentu.
Tindakan Berdasarkan Tradisi	Tindakan Tradisional Tindakan yang dihasilkan dari kebiasaan atau rutinitas lama.	Motif Sosial Tindakan yang didorong oleh norma atau harapan sosial yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat.	Pilihan politik Kiai bisa mencerminkan pola tradisional atau loyalitas historis terhadap partai atau kelompok tertentu dalam komunitas mereka.

C. Pilihan Partai Politik

Pada tataran teori tingkat menengah (Middle Range Theory) teori yang berada di antara teori abstrak (Grand Theory) dan penelitian empiris. Teori ini memiliki cakupan yang lebih sempit daripada grand theory, namun lebih luas daripada penelitian empiris. dengan menggunakan Gabriel A Almond dengan teorinya: Budaya politik parokia, budaya politik kaula serta budaya politik partisipan.⁷⁴

a. Budaya Politik Parokia

Budaya politik parokia, di mana masyarakat memiliki keterikatan yang kuat dengan komunitas lokal dan pemimpin informal, memiliki pengaruh yang kompleks terhadap pilihan partai politik kiai.

⁷⁴ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (London: Princeton University Press, 1963), 367. Abdul Chalik. In the Name Religion and Defending Women, Experiences of Three pesantren Women in Indonesia Local Elections. *JPW (Jurna Politik Walisongo) Vol 5, No 2(2023), 103-125 ISSN: 2503-3190 (P); 2503-3204 (e) DOI:10.21580/JPW.v5i2.17605.*” Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, dalam karya mereka *The Civic Culture* (1963), mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga tipe utama: parokial, kaula (subjek), dan partisipan. Budaya politik parokial ditandai oleh kesadaran politik yang rendah, di mana masyarakat memiliki pengetahuan dan minat yang minim terhadap sistem politik. Dalam budaya politik kaula, masyarakat menyadari keberadaan otoritas pemerintah dan sistem politik, namun peran mereka terbatas pada kepatuhan tanpa partisipasi aktif. Sementara itu, budaya politik partisipan menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi, dengan masyarakat yang aktif terlibat dalam proses politik dan memiliki kesadaran akan hak serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

i. Kiai sebagai tokoh sentral.

Kiai, sebagai pemimpin agama dan panutan moral di masyarakat, memiliki peran penting dalam memengaruhi pilihan politik pengikutnya. Dukungan kiai terhadap partai politik tertentu dapat meningkatkan elektabilitas partai tersebut, terutama di daerah dengan budaya politik parokial yang kuat.

ii. Pertimbangan keagamaan.

Kiai sering kali mempertimbangkan nilai-nilai dan ajaran agama dalam menentukan pilihan partai politik. Mereka memilih partai yang sejalan dengan pandangan keagamaan mereka atau partai yang dianggap dapat memperjuangkan nilai-nilai agama di pemerintahan.

iii. Kepentingan masyarakat.

Kiai juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam memilih partai politik. Mereka memilih partai yang mereka yakini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

iv. Dinamika politik local.

Kiai juga mempertimbangkan dinamika politik lokal dalam menentukan pilihan partai politik. Mereka menjalin koalisi dengan partai politik tertentu untuk memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut.

v. Tekanan dari luar.

Kiai terkadang menghadapi tekanan dari pihak luar, seperti pemerintah atau partai politik tertentu, untuk mendukung mereka dalam pemilu. Tekanan ini dapat memengaruhi pilihan partai politik kiai, meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan masyarakat.

a) Dampak pilihan partai politik kiai.

Pilihan partai politik kiai dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, seperti, konsolidasi politik, dukungan kiai terhadap partai politik tertentu dapat membantu konsolidasi politik partai tersebut di masyarakat. Kiai dapat memobilisasi pengikutnya untuk memilih partai politik yang mereka dukung, sehingga meningkatkan partisipasi pemilih.

Dimana kiai dapat membantu mewakili kepentingan masyarakat dalam proses politik, terutama di daerah yang kurang terwakili.⁷⁵

b) Tantangan dan pentingnya netralitas.

Meskipun kiai memiliki peran penting dalam politik, penting bagi mereka untuk menjaga netralitas dan tidak memihak kepada partai politik tertentu. Hal ini untuk menghindari polarisasi masyarakat dan memastikan bahwa mereka dapat mewakili kepentingan semua pihak secara adil. Kiai selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai agama dalam menentukan pilihan partai politik. Mereka juga terbuka terhadap berbagai pandangan serta aspirasi masyarakat, sekaligus berusaha untuk membangun demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

b. Budaya politik kaula dan pilihan politik

Budaya politik kaula, yang dicirikan oleh kepatuhan dan kepercayaan pada pemimpin, dapat memiliki pengaruh signifikan pada pilihan politik individu. Berikut beberapa poin penting:⁷⁶

⁷⁵ Nurhadi, Sumarso, 'Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih', *JIPP* 3, no. 2 (2015): 174." Pilihan partai politik oleh seorang kiai memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, mencakup konsolidasi politik, mobilisasi pemilih, dan representasi kepentingan masyarakat. Sebagai pemimpin agama dan patron politik, kiai memiliki kapasitas untuk membantu partai politik dalam konsolidasi kekuatan di masyarakat. Dengan pengaruh moral dan spiritualnya, kiai dapat mengarahkan pengikut untuk mendukung partai tertentu, sehingga memperkuat posisi partai tersebut di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, kiai memainkan peran penting dalam memobilisasi pemilih. Melalui ceramah agama, doa bersama, dan hubungan personal dengan pengikutnya, kiai dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Peran ini menjadi penting di daerah pedesaan atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik. Kiai juga dapat mewakili kepentingan komunitasnya dalam arena politik, terutama di daerah yang kurang terwakili. Dengan keterlibatan mereka, kiai membantu memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah atau partai politik. Peran ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara agama dan politik sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

⁷⁶ Riyanto, Astim., *Budaya Politik Indonesia*. (Jakarta: " Direktori File UPI, 2006), 2." Budaya politik kaula, yang ditandai oleh kepatuhan dan kepercayaan pada pemimpin, dapat memengaruhi pilihan politik individu. Dalam masyarakat dengan budaya politik kaula, individu cenderung menerima dan mematuhi kebijakan serta perintah dari pemimpin tanpa banyak pertanyaan atau partisipasi aktif. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang pasif dalam proses politik, di mana keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh elit atau pemimpin. Masyarakat dengan budaya politik kaula memiliki kesadaran terhadap sistem politik dan kebijakan yang ada, namun partisipasi mereka terbatas pada kepatuhan tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka cenderung mengikuti arahan pemimpin dan tidak terlibat dalam aktivitas politik seperti diskusi atau protes. Budaya politik kaula juga dapat menyebabkan masyarakat kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena adanya kepercayaan penuh pada pemimpin. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah dan memperlambat proses demokratisasi. Namun, dalam konteks tertentu, budaya politik kaula dapat memberikan stabilitas politik, karena

a) Kecenderungan memilih pemimpin karismatik.

Individu dengan budaya politik kaula cenderung tertarik pada pemimpin yang karismatik, tegas, dan memiliki kepribadian kuat. Mereka mengagumi figur yang dianggap mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara efektif. Tokoh politik dengan gaya kepemimpinan seperti ini dinilai lebih mampu membawa stabilitas dan keamanan.

b) Peran tokoh adat dan agama.

Tokoh adat dan agama sering kali memiliki pengaruh besar dalam komunitas dengan budaya politik kaula. Rekomendasi atau dukungan dari figur-figur tersebut dapat memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik individu. Masyarakat cenderung mengikuti arahan dan nasihat dari pemimpin yang mereka hormati dan percayai.⁷⁷

c) Fokus pada program dan kebijakan konkrit.

Masyarakat dengan budaya politik kaula umumnya lebih pragmatis dalam memilih pemimpin. Mereka lebih memperhatikan program dan kebijakan konkrit yang ditawarkan oleh calon pemimpin, dibandingkan dengan ideologi atau visi jangka panjang. Janji-janji yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan langsung masyarakat sehari-hari cenderung lebih menarik.

d) Peran media massa terbatas.

Pengaruh media massa terhadap pilihan politik dalam budaya politik kaula bisa jadi lebih terbatas dibandingkan dengan budaya politik lainnya. Masyarakat mungkin lebih mengandalkan informasi dari sumber-sumber terpercaya dalam komunitas mereka, seperti tokoh adat, pemimpin agama, atau tetangga.

adanya kepatuhan dan loyalitas masyarakat terhadap pemimpin. Untuk memahami lebih lanjut tentang budaya politik kaula dan pengaruhnya terhadap pilihan politik individu”

⁷⁷ Hadi, Kisno., ‘Politik Etnik Dan Kekeluargaan Sebagai Sumber Perilaku Politik Masyarakat Pedesaan Di Barito Selatan.’, *Jurnal Kawistara* 13, no. 1 (n.d.): 88.” Abdul Chalik dan Ahmad Zainul Hamdi. New Trajectory of kyai’s political participation in contemporary indonesia; rises, challenges, and opportunities. *Indonesian journal of political studies volume 2, number 2 october 2022 (131-152).*” peran tokoh agama tidak hanya memengaruhi pilihan politik tetapi juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tokoh agama menggunakan khotbah, ceramah, dan interaksi sosial lainnya untuk memberikan arahan moral dan politik yang dianggap relevan oleh pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat kaula, tokoh agama dan adat bertindak sebagai penghubung antara komunitas dan sistem politik formal, menjembatani aspirasi politik masyarakat dengan institusi formal.

e) Partisipasi politik.

Tingkat partisipasi politik dalam budaya politik kaula bisa bervariasi. Di satu sisi, rasa hormat terhadap pemimpin dan hierarki dapat mendorong partisipasi, seperti mengikuti arahan untuk memilih kandidat tertentu. Di sisi lain, apatisme politik juga bisa muncul karena keyakinan bahwa keputusan sudah ditentukan oleh pemimpin atau orang yang lebih berwenang.

Perlu diingat bahwa budaya politik hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan politik. Faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan pengalaman pribadi juga memainkan peran penting. Sebagai model bahasa yang besar, saya tidak dapat memberikan pendapat atau saran pribadi terkait pilihan politik. Namun, saya dapat membantu anda memahami bagaimana budaya politik kaula dapat memengaruhi perilaku individu dalam proses demokrasi.⁷⁸

D. Budaya Politik Gabriel Almond

Teori budaya politik yang dikembangkan oleh Gabriel Almond, bersama dengan Sidney Verba, sebuah teori yang mengkaji bagaimana budaya politik dalam masyarakat mempengaruhi sistem politik serta partisipasi politik warganya. Dalam karya mereka *The Civic Culture* (1963), Almond dan Verba mengemukakan bahwa budaya politik suatu negara berhubungan dengan tingkat partisipasi politik warga negara, serta sikap individu terhadap sistem politik yang ada, termasuk pandangan

⁷⁸ Surbakti, Ramlan., *Memahami Ilmu Politik*. (Grasindo, 1992), 16.” Budaya politik kaula, yang ditandai oleh kepatuhan dan kepercayaan terhadap pemimpin, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pilihan politik individu. Namun, pilihan politik tidak hanya ditentukan oleh budaya politik semata, melainkan juga oleh berbagai elemen lain yang turut memainkan peran penting. Salah satu elemen tersebut adalah kondisi sosial ekonomi, di mana status ekonomi dan sosial individu memengaruhi preferensi politik mereka. Sebagai contoh, kelompok dengan pendapatan tertentu mungkin memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda, yang tercermin dalam pilihan politik mereka. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi pilihan politik. Pendidikan sering kali berkorelasi dengan kesadaran politik dan kemampuan untuk menganalisis isu-isu politik secara kritis. Individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik. Pengalaman pribadi juga menjadi elemen yang membentuk pandangan politik seseorang. Interaksi dengan institusi politik dan peristiwa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari memberikan pengalaman yang dapat memengaruhi cara pandang dan pilihan politik individu. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan politik.

mereka terhadap pemerintah, partai politik, dan proses demokrasi secara keseluruhan. Teori ini memberikan pandangan penting mengenai bagaimana elemen-elemen budaya sosial mempengaruhi pola partisipasi politik masyarakat, yang tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku mereka terhadap politik dan pemerintahan. Menurut Almond, budaya politik adalah sekumpulan sikap, kepercayaan, dan nilai yang dimiliki oleh individu-individu dalam sebuah masyarakat yang mempengaruhi interaksi mereka dengan sistem politik. Teori ini menjelaskan bahwa budaya politik masyarakat akan mempengaruhi seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses politik, serta bagaimana mereka menilai legitimasi pemerintahan dan sistem politik yang ada. Secara lebih rinci, Almond membagi budaya politik menjadi tiga tipe yang berbeda, yang masing-masing menggambarkan pola hubungan individu dengan sistem politik mereka: budaya politik partisipatif, budaya politik submisif, dan budaya politik apatis.⁷⁹

1. Budaya Politik Partisipatif

Budaya politik partisipatif merujuk pada situasi di mana warga negara secara aktif terlibat dalam kehidupan politik mereka. Dalam budaya ini, masyarakat merasa memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap negara dan sistem politik mereka. Mereka tidak hanya mengetahui dan memahami hak-hak politik mereka, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, seperti pemilihan umum, diskusi politik, serta berpartisipasi dalam debat-debat politik yang relevan dengan kehidupan

⁷⁹ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, 5–12. “Gabriel Almond and Sidney Verba’s seminal work, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (1963), delves into the ways political culture impacts democratic stability and the level of citizen participation in different societies. In their analysis, they identify three distinct types of political cultures. First, the Parochial Culture, where citizens have limited knowledge of the central government and its functions, resulting in minimal involvement in political activities. Second, the Subject Culture, where citizens are aware of the central government’s decisions but remain largely passive, showing little interest or involvement in political processes. Lastly, there is the Participant Culture, where citizens are highly engaged in the political process, demonstrating both awareness and active participation. Almond and Verba argue that the most effective and stable democracy thrives on a balance of these cultural types, which they term the “civic culture.” This culture fosters a healthy mix of active participation, respect for authority, and civic engagement, all contributing to the resilience and stability of democratic systems.”

mereka. Individu dalam budaya ini merasa bahwa mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dan menjalankan demokrasi. Mereka berpartisipasi dalam pemilu dengan harapan bahwa suara mereka dapat mempengaruhi keputusan politik, serta menjaga agar sistem politik tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁸⁰ Dalam konteks masyarakat yang memiliki budaya politik partisipatif, pemilih tidak hanya terlibat dalam pemilihan umum tetapi juga berusaha untuk memahami isu-isu politik dan sosial yang sedang berkembang. Mereka cenderung menganggap proses politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa partisipasi mereka dalam politik dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Keterlibatan ini mencerminkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pentingnya demokrasi dan hak-hak politik, yang selanjutnya mendorong mereka untuk aktif dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.⁸¹

2. Budaya Politik Submisif

Di sisi lain, dalam budaya politik submisif, meskipun warga negara memiliki pengetahuan tentang politik, mereka cenderung lebih pasif dalam berpartisipasi. Warga negara dalam budaya politik ini mungkin mengetahui tentang sistem politik mereka, menyadari hak mereka sebagai warga negara, dan memiliki sikap yang cenderung mendukung sistem yang ada, namun mereka tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Mereka lebih cenderung untuk mematuhi keputusan yang diambil oleh pemerintah atau elite politik tanpa merasa perlu untuk terlibat dalam diskusi atau keputusan politik itu sendiri.⁸²

⁸⁰ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., 14–15.

⁸¹ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., 30–35.

⁸² Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., 50–55." In *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (1963), Gabriel Almond and Sidney Verba describe the concept of a "subject political culture," where citizens, although they possess knowledge about politics and understand their rights, tend to be more passive in their participation. In this type of political culture, individuals are aware of the political system, recognize their rights as citizens, and often support the existing political structure. However, they do not actively engage in political activities. They are

Dalam budaya politik submisif, warga negara mungkin memiliki kesadaran bahwa mereka dapat mempengaruhi keputusan politik, namun mereka merasa tidak ada manfaat langsung dari partisipasi mereka. Mereka lebih memilih untuk menyerahkan keputusan politik kepada pihak yang dianggap lebih berkompeten atau memiliki wewenang lebih besar. Hal ini mungkin terjadi karena adanya persepsi bahwa keputusan politik sering kali berada di luar kendali mereka, atau karena adanya ketidakpercayaan terhadap kapasitas diri mereka dalam mempengaruhi proses politik secara substansial. Dengan demikian, meskipun mereka memahami dan menghargai nilai-nilai demokrasi, mereka tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam politik.⁸³

3. Budaya Politik Apatis

Berbeda dengan kedua jenis budaya politik yang telah dijelaskan sebelumnya, budaya politik apatis kondisi di mana warga negara merasa terasing atau tidak terhubung dengan sistem politik mereka. Dalam budaya politik ini, partisipasi politik rendah, dan banyak individu yang tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan politik. Mereka mungkin merasa bahwa sistem politik tidak memberi mereka ruang guna berpartisipasi, atau bahwa keputusan politik tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu atau bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.⁸⁴

Budaya politik apatis sering kali muncul sebagai hasil dari ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau institusi yang ada. Warga negara yang berada dalam budaya ini mungkin merasa bahwa sistem politik tidak bekerja untuk mereka, atau bahwa suara mereka tidak akan membawa

more inclined to comply with decisions made by the government or political elites, without feeling the need to involve themselves in political discussions or decision-making processes. Almond and Verba suggest that while this type of culture can provide stability, it may hinder the development of more active political participation and democratic involvement, as citizens do not directly engage in influencing political outcomes.”

⁸³ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., 65.

⁸⁴ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., 70–75.

perubahan yang signifikan. Mereka juga merasa tidak ada hubungan yang kuat antara kehidupan mereka dan keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah atau elite politik. Dalam kondisi ini, warga negara tidak terlibat dalam proses politik dan lebih memilih untuk tidak peduli dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Sebagai hasilnya, mereka cenderung mengabaikan pemilu dan tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan politik.⁸⁵

Teori budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond memiliki relevansi yang kuat dalam memahami keputusan dan tindakan politik individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk dalam konteks pilihan politik Kiai di Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur. Dalam studi mengenai tindakan Kiai dalam memilih partai politik, dapat dilihat bagaimana budaya politik di komunitas pesantren dapat mempengaruhi pola partisipasi politik mereka.

Kiai sebagai tokoh masyarakat, pemimpin spiritual memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap, tindakan politik para santri dan komunitas pesantren. Dalam hal ini, budaya politik partisipatif, submisif, atau apatis yang ada di dalam pesantren dapat mempengaruhi bagaimana kiai membuat keputusan politik, baik dalam mendukung partai politik tertentu maupun dalam mempengaruhi pilihan politik para santri. Jika budaya politik dalam pesantren bersifat partisipatif, Kiai kemungkinan akan lebih aktif dalam menyuarakan dukungannya terhadap partai politik dan mengajak santri untuk turut serta dalam proses politik, seperti pemilu. Sebaliknya, jika budaya politik lebih cenderung submisif atau apatis, Kiai mungkin hanya terlibat secara terbatas dalam keputusan politik, dan pengaruhnya terhadap pilihan politik santri akan lebih bersifat tidak langsung.

Di Indonesia, kiai memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk ranah politik. Budaya politik partisipan, di mana masyarakat aktif terlibat dalam proses politik, berinteraksi dengan dinamika

⁸⁵ Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba., 85.

pilihan politik kiai dengan berbagai cara. Berikut beberapa poin pentingnya.⁸⁶

1. Kiai sebagai figur sentral.

Kiai dihormati sebagai pemimpin agama dan moral, sehingga pandangan politiknya didengar dan dipertimbangkan oleh banyak orang. Dukungan kiai terhadap calon politik tertentu dapat meningkatkan peluang mereka untuk menang. Namun, pengaruh kiai bervariasi tergantung pada konteks lokal, karisma pribadi, dan kepercayaan masyarakat.

2. Partisipasi politik kiai.

Kiai dapat terlibat dalam politik secara langsung, seperti mencalonkan diri atau menduduki jabatan politik. Mereka juga dapat memobilisasi dukungan untuk calon tertentu atau partai politik melalui ceramah, pengajian, dan jaringan pesantren. Peran politik kiai bisa memicu perdebatan, dengan beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh agama, sementara yang lain melihatnya sebagai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin masyarakat.

3. Budaya politik partisipan dan pilihan politik kiai.

Dalam budaya politik partisipan, masyarakat didorong untuk berpikir kritis dan membuat pilihan politik mereka sendiri. Hal ini dapat membuat kiai lebih berhati-hati dalam menyuarakan dukungan politik, karena mereka mempertimbangkan potensi perbedaan pendapat dalam komunitas mereka. Namun, budaya partisipan juga membuka ruang bagi kiai untuk mendidik, memberdayakan masyarakat dalam membuat keputusan politik yang informed.

⁸⁶ Miftah Faridl, 'Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia.', 204." udaya politik partisipan di Indonesia ditandai oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum dan partisipasi dalam organisasi politik. Dalam konteks ini, kiai memiliki peran signifikan dalam memobilisasi dan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Sebagai pemimpin agama dan tokoh masyarakat, kiai sering menjadi panutan dan sumber legitimasi bagi komunitasnya. Dukungan atau arahan politik dari kiai dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memengaruhi preferensi politik mereka. Peran kiai dalam politik Indonesia mencakup tiga aspek utama: sebagai patron politik, elit politik, dan mediator politik. Sebagai patron politik, kiai menjadi acuan dalam menentukan pilihan politik bagi pengikutnya. Sebagai elit politik, kiai aktif dalam kepengurusan partai politik dan mobilisasi massa. Sebagai mediator politik, kiai berperan dalam menyelesaikan konflik politik di masyarakat. Dengan demikian, dalam budaya politik partisipan di Indonesia, kiai memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat."

4. Faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik kiai.

Pilihan politik kiai dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai-nilai agama, keyakinan ideologis, pertimbangan pragmatis, dan hubungan dengan aktor politik lainnya. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menganalisis pengaruh kiai dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya.

5. Dampak pilihan politik kiai.

Pilihan politik kiai dapat berdampak signifikan pada hasil pemilu,⁸⁷ terutama di daerah dengan populasi muslim yang taat. Keputusan kiai juga dapat mempengaruhi kebijakan publik dan arah pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan menganalisis peran politik kiai untuk memahami dinamika politik di Indonesia.⁸⁸

⁸⁷ Bruinessen, M. V., *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.*, 90.” Pilihan politik kiai dapat berdampak signifikan pada hasil pemilu, terutama di Indonesia, di mana kiai memiliki peran yang kuat sebagai tokoh agama sekaligus pemimpin sosial dalam komunitas Muslim. Sebagai panutan bagi masyarakat, keputusan politik yang diambil oleh kiai sering kali memengaruhi preferensi politik para pengikutnya. Hal ini terjadi karena kiai memiliki legitimasi moral dan spiritual yang tinggi, sehingga masyarakat cenderung mempercayai pandangan mereka, termasuk dalam hal politik. Dukungan kiai terhadap kandidat tertentu dapat memperkuat basis suara kandidat tersebut, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan populasi Muslim yang besar. Contohnya adalah peran kiai dalam pemilihan presiden di Indonesia, di mana dukungan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) atau organisasi Islam lainnya mampu memobilisasi suara dalam jumlah signifikan. Lebih jauh, keterlibatan kiai dalam politik sering kali tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan, tetapi juga mencakup advokasi terhadap kebijakan yang mereka anggap relevan bagi umat Islam. Misalnya, dalam kampanye politik, kiai dapat memanfaatkan khotbah atau pengajian sebagai platform untuk menyampaikan pandangan politik yang mereka anggap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengaruh politik kiai tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang terhadap dinamika politik dan sosial di masyarakat.

⁸⁸ Aziz, Rizky Amalia., ‘Kiai Dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori Dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma’ruf Amin Pada Pilpres 2019 Di Kecamatan Tegalrejo.’, *Jurnal PolGov*, 2, no. 2 (2020): 223.” Pilihan politik kiai memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu, terutama di daerah dengan populasi Muslim yang taat. Sebagai pemimpin agama dan tokoh masyarakat, kiai sering menjadi panutan bagi komunitasnya. Dukungan atau arahan politik dari kiai dapat memobilisasi massa dan memengaruhi preferensi politik masyarakat. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Aziz, peran Kiai Yusuf Chudlori sebagai konsolidator jaringan kiai dan mobilisator suara pemilih terbukti efektif dalam kemenangan kandidat Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo. Selain memengaruhi hasil pemilu, keputusan politik kiai juga dapat berdampak pada kebijakan publik dan arah pemerintahan. Kiai yang terlibat dalam politik praktis sering kali memiliki akses langsung atau tidak langsung terhadap pengambilan keputusan politik, sehingga dapat memperjuangkan kepentingan komunitasnya dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, peran politik kiai menjadi faktor penting dalam dinamika politik Indonesia. Memantau dan menganalisis peran politik kiai membantu memahami bagaimana pengaruh mereka membentuk proses politik dan kebijakan di Indonesia.

Budaya politik partisipan menciptakan hubungan yang dinamis antara kiai dan pilihan politik mereka. Kiai dihadapkan dengan keseimbangan antara pengaruh tradisional mereka dan norma-norma partisipasi demokratis. Memahami faktor-faktor yang mendasari pilihan politik kiai dan dampaknya penting untuk analisis politik yang lebih komprehensif di Indonesia.

E. Teori Sosial Kritis Pierre Felix Boudieu

Penggunaan teori ini meminjam pemikiran Pierre Felix Boudieu. Penggunaan teori terapan ini dirancang untuk digunakan dalam praktik guna memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan di dunia nyata. Dimana teori terapan biasanya didasarkan pada teori dasar yang telah diteliti sekaligus diuji secara ilmiah, tetapi teori terapan disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu yaitu dengan pemikirannya: *habitus, ranah dan modal*.⁸⁹

a. Habitus

Habitus memiliki pengaruh yang kompleks dan multidimensi terhadap perilaku kiai dalam memilih partai politik. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan.⁹⁰

⁸⁹ Hilgers, Mathieu, dan Eric Mangez., 'Introduction to Pierre Bourdieu's Theory of Social Fields.' Dalam *Bourdieu's Theory of Social Fields: Concepts and Applications*, (Routledge, 2015), 36." Penggunaan teori terapan yang meminjam pemikiran Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, ranah (field), dan modal (capital), dirancang untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan di dunia nyata. Teori terapan ini biasanya didasarkan pada teori dasar yang telah diteliti dan diuji secara ilmiah, kemudian disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu. Bourdieu mengembangkan konsep habitus sebagai disposisi yang membentuk persepsi, pemikiran, dan tindakan individu dalam konteks sosial tertentu. Konsep ranah merujuk pada arena sosial tempat individu dan kelompok berinteraksi, bersaing, dan berjuang untuk memperoleh berbagai bentuk modal, seperti modal ekonomi, sosial, dan budaya. Modal, dalam pandangan Bourdieu, mencakup sumber daya dan aset yang dapat digunakan individu untuk memperoleh posisi dan kekuasaan dalam ranah sosial tertentu. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, teori terapan dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan memahami dinamika sosial dalam berbagai konteks praktis."

⁹⁰ Bourdieu, Pierre., *Outline of a Theory of Practice*. (Cambridge University Press, 1977), 381." Habitus, menurut Pierre Bourdieu, adalah sekumpulan disposisi yang membentuk persepsi, pemikiran, dan tindakan individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks perilaku kiai dalam memilih partai politik, habitus memainkan peran kompleks dan multidimensional. Latar belakang sosial dan pendidikan kiai memengaruhi preferensi politik mereka. Misalnya, kiai yang dibesarkan dalam lingkungan tradisional cenderung mendukung partai yang mengedepankan nilai-nilai konservatif. Selain itu, lingkungan pesantren sebagai pusat kegiatan kiai juga membentuk

i. Modal sosial dan kultural.

Kiai dengan modal sosial dan kultural tinggi, seperti memiliki banyak pengikut dan pengaruh di komunitasnya, cenderung lebih selektif dalam memilih partai politik. Mereka mempertimbangkan keselarasan ideologi dan nilai-nilai partai dengan nilai-nilai keagamaan dan tradisi yang mereka anut.

Kiai dengan jaringan dan koneksi luas, baik dengan ulama lain, tokoh masyarakat, maupun elit politik, memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih partai politik. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peluang untuk mendapatkan dukungan politik dan akses terhadap sumber daya.

Kiai dengan modal sosial dan kultural yang tinggi memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia, terutama karena pengaruh mereka yang besar di komunitas lokal. Modal sosial kiai tidak hanya mencakup jumlah pengikut mereka, tetapi juga kepercayaan, penghormatan, dan legitimasi yang diberikan masyarakat. Hal ini membuat mereka menjadi aktor strategis dalam pemilihan partai politik yang akan mereka dukung. Dalam proses pengambilan keputusan ini, kiai dengan modal sosial yang tinggi biasanya lebih selektif, memastikan bahwa pilihan politik mereka sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan tradisi yang mereka anut.⁹¹

Keselarasan ideologi dan nilai antara partai politik dan komunitas kiai menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan. Misalnya, kiai sering kali mendukung partai yang memiliki platform kebijakan yang memperjuangkan pendidikan Islam, kesejahteraan umat, atau nilai-nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, kiai tidak hanya mempertimbangkan manfaat langsung bagi komunitas mereka, tetapi juga dampak jangka panjang

habitus mereka, di mana norma dan nilai pesantren menjadi dasar keputusan politik. Interaksi kiai dengan aktor politik, seperti kandidat atau partai, turut membentuk habitus politik mereka, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan partai. Sebagai patron dalam komunitasnya, habitus kiai tidak hanya memengaruhi keputusan politik pribadi, tetapi juga arahan politik yang mereka berikan kepada pengikutnya. Dengan memahami habitus kiai, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana latar belakang sosial, pendidikan, dan interaksi mereka membentuk perilaku politik, khususnya dalam memilih partai politik.”

⁹¹ Faridl, Miftah., ‘Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia.’, *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19, no. 2 (2003): 195.

terhadap pelestarian tradisi Islam dan budaya lokal. Dukungan terhadap partai politik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka dapat merusak kepercayaan pengikut dan melemahkan posisi kiai sebagai pemimpin moral.

Bagi kiai dengan jaringan luas, pertimbangan dalam memilih partai politik menjadi lebih kompleks. Koneksi mereka dengan ulama lain, tokoh masyarakat, dan elit politik memberi mereka akses ke berbagai informasi dan peluang. Dengan jaringan yang kuat, kiai dapat mengevaluasi lebih banyak opsi politik, termasuk manfaat potensial yang ditawarkan oleh berbagai partai. Misalnya, partai politik yang memberikan peluang untuk akses terhadap sumber daya, seperti dana pembangunan pesantren atau bantuan sosial, mungkin menjadi pilihan menarik bagi kiai yang ingin memperkuat komunitas mereka.

Namun, keputusan kiai tidak hanya didasarkan pada manfaat pragmatis. Sebagai pemimpin moral, kiai juga mempertimbangkan dampak sosial dari pilihan politik mereka. Mereka memastikan bahwa keputusan mereka tidak menciptakan perpecahan di masyarakat atau merusak hubungan dengan kelompok lain. Dalam hal ini, kiai sering kali memainkan peran sebagai mediator, mencoba menemukan titik temu antara berbagai kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan yang mereka pegang. Keputusan politik kiai mencerminkan tanggung jawab mereka untuk menjaga harmoni sosial sekaligus mempromosikan kepentingan umat Islam.

Selain itu, kiai dengan jaringan yang kuat juga memiliki peluang untuk memengaruhi agenda partai politik. Dalam beberapa kasus, partai politik mungkin mendekati kiai dengan harapan mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim yang mereka pimpin. Dalam situasi ini, kiai dapat menggunakan posisi mereka untuk memengaruhi kebijakan partai agar lebih berpihak pada kepentingan umat Islam. Sebagai contoh, kiai dapat mengadvokasi program pendidikan Islam, kebijakan ekonomi berbasis syariah, atau perlindungan hak-hak minoritas Muslim.⁹²

⁹² Ulin Nuha, "Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik Di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh Di Partai Persatuan Pembangunan)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2012): 30.

Namun, keterlibatan kiai dalam politik juga menghadirkan risiko. Jika dukungan mereka terhadap partai politik tertentu dianggap terlalu politis atau oportunistik, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peran mereka sebagai pemimpin agama. Kritik terhadap keterlibatan kiai dalam politik sering kali mencakup isu konflik kepentingan, terutama jika keputusan mereka lebih didasarkan pada keuntungan pribadi daripada kepentingan komunitas. Untuk mengatasi tantangan ini, kiai perlu memastikan bahwa keputusan politik mereka transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik pilihan mereka.

Kiai dengan modal sosial dan kultural yang tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas tradisi Islam di tengah dinamika politik yang berubah-ubah. Mereka memastikan bahwa dukungan politik mereka tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai Islam dan keberlanjutan komunitas Muslim. Dalam hal ini, kiai dapat berperan sebagai penjaga moralitas politik, mengingatkan partai politik dan elit kekuasaan tentang pentingnya nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial.⁹³

Selain itu, keputusan politik kiai juga sering dipengaruhi oleh dinamika lokal. Dalam komunitas Muslim yang terfragmentasi secara

⁹³ Abdul Mukti Thabrani, *Politik Kiai Dan Kiai Politik: Aksi Dan Interpretasi Pesantren Dalam Pemaknaan Dan Pergumulan Politik Islam*, (IAIN Madura, 2015), 67.” Kiai yang memiliki modal sosial dan kultural yang tinggi memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara tradisi Islam dan realitas politik yang terus berubah. Sebagai pemimpin agama yang dihormati, mereka tidak hanya memiliki pengaruh dalam komunitas pesantren, tetapi juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam politik tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak hanya berfokus pada kepentingan pragmatis jangka pendek. Dalam konteks politik, kiai berfungsi sebagai penjaga moralitas dengan mengingatkan partai politik dan elit kekuasaan akan pentingnya nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Mereka dapat berperan sebagai penghubung antara kepentingan umat Islam dan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, kiai juga berhati-hati dalam memberikan dukungan politik agar tidak merusak kredibilitas mereka di mata umat. Jika dukungan mereka dianggap terlalu transaksional atau pragmatis, maka kepercayaan masyarakat terhadap peran kiai sebagai pemimpin moral bisa berkurang. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika politik yang selalu berubah, kiai perlu menjaga keseimbangan antara keterlibatan politik dan pelestarian nilai-nilai Islam, sehingga peran mereka tetap relevan dan dihormati oleh umat.

politik, kiai sering kali menyeimbangkan berbagai kepentingan untuk menjaga kesatuan komunitas. Misalnya, di daerah dengan beberapa kelompok Muslim yang memiliki afiliasi politik berbeda, kiai berhati-hati untuk tidak mendukung salah satu kelompok secara eksklusif, karena hal ini dapat menciptakan konflik internal. Sebaliknya, kiai dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempromosikan dialog dan kerja sama antara kelompok-kelompok tersebut.

ii. Kepentingan politik dan ekonomi.

Kiai yang memiliki agenda politik tertentu, seperti memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada umat Islam atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cenderung memilih partai politik yang sejalan dengan tujuan mereka.

Kiai yang memiliki usaha atau bisnis pribadi mungkin mempertimbangkan dukungan partai politik terhadap kepentingan ekonomi mereka. Kiai yang ingin mendapatkan akses terhadap sumber daya, seperti dana untuk pembangunan masjid atau pesantren, mungkin memilih partai politik yang dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut.

Kiai, sebagai tokoh sentral dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim, sering kali memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah politik komunitas mereka. Pilihan politik kiai tidak hanya didasarkan pada preferensi pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh agenda-agenda yang ingin mereka perjuangkan. Misalnya, kiai yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada umat Islam cenderung mendukung partai politik yang sejalan dengan tujuan tersebut.⁹⁴

⁹⁴ Faridl, Miftah., 'Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia.', 202.' Dalam politik Indonesia, peran kiai tidak hanya sebatas sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dan arah politik. Kiai yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada umat Islam cenderung mendukung partai politik yang memiliki platform dan agenda yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dukungan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan ideologi, seperti kesamaan nilai-nilai Islam, komitmen terhadap keadilan sosial, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, kiai yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan umat dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan santri dan masyarakat pesantren dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu merealisasikan kebijakan pro-rakyat dan pro-Islam. Mereka juga sering terlibat dalam diskusi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah, serta mendorong legislasi yang

Dalam konteks ini, kiai sering kali memanfaatkan peran mereka sebagai pemimpin moral untuk membangun hubungan strategis dengan partai politik. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan dua arah: di satu sisi, kiai dapat memengaruhi kebijakan partai untuk lebih mendukung nilai-nilai Islam dan kebutuhan komunitas Muslim, sementara di sisi lain, partai politik dapat memperoleh dukungan elektoral dari masyarakat yang mengikuti arahan kiai.

Bagi kiai yang juga terlibat dalam kegiatan ekonomi, pertimbangan politik mereka sering kali mencakup aspek ekonomi. Misalnya, kiai yang memiliki usaha atau bisnis pribadi mungkin mendukung partai politik yang mempromosikan kebijakan ekonomi yang kondusif untuk perkembangan bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, kiai yang memiliki jaringan bisnis besar dapat menjadi aktor penting dalam memperkuat basis ekonomi partai politik yang mereka dukung. Hal ini menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana partai politik dapat memanfaatkan dukungan ekonomi dari kiai, sementara kiai memperoleh jaminan bahwa kebijakan pemerintah yang dihasilkan akan mendukung kepentingan bisnis mereka.

Di sisi lain, kiai juga sering kali mempertimbangkan akses terhadap sumber daya sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Sumber daya ini bisa berupa dana untuk pembangunan masjid, pesantren, atau infrastruktur lain yang dibutuhkan komunitas Muslim. Dalam konteks ini, kiai sering menjalin hubungan erat dengan partai politik yang mampu memberikan dukungan konkret untuk kebutuhan komunitas mereka. Misalnya, sebuah partai yang memiliki akses ke anggaran pemerintah atau koneksi dengan pengusaha besar mungkin

mengakomodasi kepentingan umat Islam, seperti perlindungan terhadap ekonomi syariah, pendidikan berbasis Islam, dan kesejahteraan kaum dhuafa. Namun, dukungan kiai terhadap partai politik tertentu juga bisa berdampak, terutama jika dianggap terlalu politis atau tidak lagi murni memperjuangkan kepentingan umat. Oleh karena itu, penting bagi kiai untuk tetap menjaga keseimbangan antara peran keagamaan dan politik, sehingga pengaruh mereka tetap diterima oleh masyarakat dengan penuh kepercayaan dan tidak menimbulkan perpecahan di lingkungan pesantren dan komunitas Islam yang lebih luas.

menjadi pilihan utama bagi kiai yang membutuhkan dana untuk memperluas fasilitas pesantren mereka.

Lebih jauh, hubungan antara kiai dan partai politik sering kali melibatkan negosiasi yang kompleks. Dalam negosiasi ini, kiai tidak hanya mempertimbangkan manfaat langsung bagi komunitas mereka, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap hubungan sosial dan politik di masyarakat. Sebagai contoh, kiai yang mendukung partai tertentu mempertimbangkan potensi reaksi dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda. Oleh karena itu, keputusan politik kiai sering kali mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan pragmatis dengan tanggung jawab moral mereka sebagai pemimpin agama.

Dalam beberapa kasus, keterlibatan kiai dalam politik juga didorong oleh keinginan untuk memperluas pengaruh mereka di luar komunitas religius. Melalui dukungan terhadap partai politik tertentu, kiai dapat meningkatkan visibilitas mereka di tingkat nasional dan memperkuat legitimasi mereka sebagai tokoh berpengaruh dalam isu-isu publik. Hal ini tidak hanya membantu kiai dalam mempromosikan agenda mereka, tetapi juga membuka peluang untuk membangun jaringan yang lebih luas dengan pemimpin politik, pengusaha, dan tokoh masyarakat lainnya.⁹⁵

⁹⁵ Eko Setiawan, 'Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 8." Dukungan kiai terhadap partai politik tertentu bukan hanya sekadar bentuk keterlibatan dalam dunia politik, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan visibilitas dan legitimasi mereka sebagai pemimpin yang berpengaruh dalam isu-isu publik. Dengan berafiliasi atau mendukung partai politik yang memiliki visi sejalan dengan kepentingan umat, kiai dapat memperkuat posisi mereka dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, ekonomi Islam, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, keterlibatan politik ini juga membuka peluang bagi kiai untuk membangun jaringan yang lebih luas, baik dengan pemimpin politik, pengusaha, maupun tokoh masyarakat lainnya. Jaringan ini dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam secara lebih efektif, misalnya dalam mendapatkan dukungan terhadap program pesantren, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, atau kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai Islam. Dengan akses yang lebih besar terhadap pengambil kebijakan, kiai memiliki yang lebih kuat dalam mempengaruhi arah pembangunan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Namun, penting bagi kiai untuk menjaga keseimbangan dalam keterlibatan politik agar tidak kehilangan independensi moral mereka. Jika dukungan mereka terhadap partai politik terlalu transaksional, mereka bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, kiai tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dan kepentingan umat dalam setiap keputusan politik yang mereka ambil, sehingga peran mereka sebagai pemimpin moral tetap dihormati dan relevan dalam dinamika politik nasional.

Namun, keterlibatan kiai dalam politik tidak selalu tanpa kontroversi. Beberapa kritik menyatakan bahwa dukungan politik kiai dapat menciptakan konflik kepentingan, terutama jika keputusan mereka lebih didasarkan pada keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas. Misalnya, jika seorang kiai mendukung partai politik yang menawarkan manfaat ekonomi langsung kepada mereka, tetapi kebijakan partai tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam atau kebutuhan masyarakat, hal ini dapat merusak reputasi kiai sebagai pemimpin moral.

Untuk mengatasi tantangan ini, kiai perlu memastikan bahwa keputusan politik mereka transparan dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Mereka juga melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dukungan politik yang mereka berikan mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi mereka sebagai pemimpin agama yang berkomitmen pada kesejahteraan umat.⁹⁶

Selain itu, keterlibatan kiai dalam politik juga dapat dilihat sebagai bentuk dakwah yang lebih luas. Dengan mendukung partai politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, kiai dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat Islam. Misalnya, kiai dapat mengadvokasi kebijakan yang mendukung pendidikan Islam, perlindungan hak-hak minoritas Muslim, atau pengentasan kemiskinan di komunitas Muslim.

iii. Dinamika politik lokal dan nasional.

Kekuatan partai politik di daerah dengan dominasi satu partai politik tertentu, kiai memilih partai tersebut karena pengaruhnya yang kuat dan peluang untuk mendapatkan keuntungan politik. Perubahan politik nasional atau peristiwa politik nasional, seperti pemilihan umum atau pergantian rezim, dapat memengaruhi pilihan partai politik kiai. Mereka

⁹⁶ Nurhadi., 'Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih.', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3, no. 4 (2018): 10.

mempertimbangkan stabilitas politik dan prospek masa depan negara.⁹⁷

Dinamika politik lokal dan nasional memengaruhi secara signifikan pilihan partai politik kiai di Indonesia. Sebagai pemimpin agama yang juga memainkan peran sosial dan politik, kiai tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dalam keputusan mereka, tetapi juga berbagai faktor politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks politik lokal, dominasi satu partai politik tertentu di suatu daerah sering kali menjadi faktor penentu pilihan kiai. Dukungan terhadap partai dominan biasanya dianggap sebagai langkah strategis karena memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan politik, seperti akses terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan dukungan bagi program-program komunitas mereka.

Misalnya, di daerah dengan basis pendukung Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat, partai-partai yang memiliki hubungan historis dengan NU, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sering kali menjadi pilihan utama kiai. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa partai tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai Islam tradisional dan mendukung program-program pendidikan pesantren. Di sisi lain, di daerah

⁹⁷ Ulin Nuha, "Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik Di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh Di Partai Persatuan Pembangunan)," 32." Di daerah yang didominasi oleh satu partai politik tertentu, kiai sering kali memilih untuk mendukung partai tersebut karena kekuatan dan pengaruhnya dalam pemerintahan lokal. Keputusan ini biasanya bersifat pragmatis, karena dengan berafiliasi dengan partai yang berkuasa, kiai dapat lebih mudah memperjuangkan kepentingan pesantren, komunitas santri, serta masyarakat Muslim secara lebih luas. Selain itu, dukungan terhadap partai dominan juga memberikan peluang bagi kiai untuk mendapatkan akses ke kebijakan pemerintah, bantuan sosial, serta dukungan finansial untuk lembaga pendidikan Islam yang menjadi pimpin mereka. Namun, pilihan politik kiai tidak selalu bersifat statistik. Perubahan umum politik nasional, seperti pemilu, pergantian rezim, atau dinamika kebijakan pemerintahan, dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menentukan partai politik yang didukung. Stabilitas politik dan prospek masa depan negara menjadi pertimbangan utama bagi kiai dalam menentukan sikap politik mereka. Jika sebuah partai atau calon pemimpin dianggap lebih mampu membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat, kiai mungkin mengalihkan dukungan mereka. Selain itu, kiai juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan politik mereka. Dukungan yang diberikan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan umat, bukan sekedar kepentingan jangka pendek. Dengan menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan idealisme keislaman, kiai dapat tetap berperan sebagai penjaga moralitas dalam politik serta sebagai pemimpin yang dihormati oleh masyarakat luas.

dengan dominasi partai nasionalis atau sekuler, kiai memilih untuk mendukung partai tersebut demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan memastikan stabilitas komunitas mereka.

Di tingkat nasional, perubahan dalam lanskap politik juga memiliki dampak besar pada pilihan politik kiai. Peristiwa seperti pemilihan umum, pergantian rezim, atau perubahan besar dalam kebijakan nasional sering kali mendorong kiai untuk menilai kembali afiliasi politik mereka. Misalnya, dalam pemilu presiden, kiai sering kali mempertimbangkan stabilitas politik dan prospek masa depan negara ketika menentukan dukungan mereka. Stabilitas politik menjadi perhatian utama karena dapat memengaruhi keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan program-program keagamaan.⁹⁸

Selain itu, kiai juga mempertimbangkan prospek masa depan negara dalam memilih partai politik. Mereka cenderung mendukung partai atau kandidat yang dianggap mampu membawa kemajuan ekonomi, menjaga harmoni sosial, dan melindungi nilai-nilai keagamaan. Dalam situasi tertentu, kiai dapat memainkan peran sebagai penyeimbang antara kelompok politik yang berseberangan untuk memastikan bahwa kepentingan umat Islam tetap terjaga dalam dinamika politik nasional.

Kekuatan partai politik di tingkat lokal dan nasional juga sering kali dipengaruhi oleh dukungan dari komunitas agama. Dalam hal ini, dukungan dari kiai tidak hanya memberikan legitimasi moral kepada partai, tetapi juga memobilisasi basis massa yang besar. Oleh karena itu, partai-partai politik sering kali menjalin hubungan strategis dengan kiai untuk mendapatkan dukungan elektoral, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis komunitas Muslim.⁹⁹

⁹⁸ Hasanatul Jannah, 'Kyai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan', *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 1 (2015): 160.

⁹⁹ Miftah Faridl., 'Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia.', 198." Partai politik di Indonesia menyadari bahwa kiai memiliki pengaruh besar dalam komunitas Muslim, terutama di daerah-daerah dengan tradisi pesantren yang kuat. Oleh karena itu, mereka sering menjalin hubungan strategis dengan kiai untuk mendapatkan dukungan elektoral. Hal ini dilakukan karena kiai bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga tokoh sosial yang memiliki jaringan luas di masyarakat, sehingga suara mereka dapat mempengaruhi preferensi politik santri dan masyarakat. Hubungan antara kiai dan partai politik ini bisa berbentuk kerja sama jangka panjang maupun dukungan sementara saat pemilu. Beberapa partai bahkan melibatkan kiai dalam struktur kepemimpinan mereka,

Namun, keputusan politik kiai juga tidak lepas dari tantangan. Dalam situasi di mana ada perpecahan politik di antara komunitas Muslim, kiai berhati-hati agar tidak memicu konflik internal. Misalnya, jika sebuah komunitas memiliki afiliasi politik yang terbelah antara dua partai besar, dukungan kiai terhadap salah satu partai dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, kiai sering kali mencoba mengambil pendekatan yang netral atau mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dinamika politik lokal dan nasional juga membuka peluang bagi kiai untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk kebijakan publik. Dengan mendukung partai politik yang memiliki akses ke kekuasaan, kiai dapat memengaruhi kebijakan yang relevan bagi komunitas Muslim, seperti pendidikan agama, pembangunan infrastruktur pesantren, atau penguatan ekonomi berbasis syariah. Dalam hal ini, dukungan politik kiai sering kali didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, termasuk dampak kebijakan terhadap keberlanjutan komunitas mereka.¹⁰⁰

Selain itu, perubahan politik nasional sering kali menciptakan tantangan baru bagi kiai. Misalnya, pergantian rezim dapat membawa perubahan dalam kebijakan yang memengaruhi kebebasan beragama, alokasi anggaran untuk pendidikan agama, atau regulasi pesantren. Dalam situasi seperti ini, kiai beradaptasi dengan cepat untuk melindungi kepentingan komunitas mereka. Mereka mungkin perlu menjalin aliansi dengan partai politik yang baru berkuasa atau mencari cara untuk memitigasi dampak negatif dari perubahan kebijakan tersebut.

memberikan peran mereka sebagai penasihat atau figur simbolis yang mewakili nilai-nilai Islam dalam politik. Selain itu, partai politik juga sering mengadakan pertemuan, diskusi, atau kegiatan sosial di lingkungan pesantren untuk menarik simpati dan dukungan dari para kiai. Namun, keterlibatan kiai dalam politik juga menimbulkan tantangan tersendiri. Jika dukungan politik mereka dianggap terlalu transaksional atau pragmatis, kepercayaan masyarakat terhadap independensi moral mereka bisa berkurang. Oleh karena itu, penting bagi kiai untuk tetap menjaga integritas dan memastikan bahwa dukungan politik mereka selaras dengan nilai-nilai Islam serta kepentingan umat, bukan sekadar keuntungan jangka pendek bagi individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hubungan antara kiai dan partai politik dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

¹⁰⁰ Eko Setiawan, 'Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat', 8.

Namun, keterlibatan kiai dalam politik juga memunculkan kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa dukungan politik kiai sering kali terlalu pragmatis dan tidak sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Kritik ini terutama muncul ketika kiai mendukung partai politik yang memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menjaga legitimasi mereka sebagai pemimpin moral, kiai memastikan bahwa keputusan politik mereka transparan dan mencerminkan nilai-nilai Islam.

iv. Faktor personal dan ideologis.

Keyakinan politik pribadi dimana kiai memiliki keyakinan politik pribadi yang memengaruhi pilihan mereka. Mereka condong ke partai politik tertentu karena ideologi, platform, atau figur pemimpinnya. Hubungan personal dengan politisi kiai memilih partai politik berdasarkan hubungan personal dengan politisi tertentu, seperti ikatan persahabatan atau rasa hormat.¹⁰¹

Faktor personal dan ideologis memegang peranan penting dalam menentukan pilihan politik kiai. Sebagai tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar, keputusan kiai sering kali didasarkan pada keyakinan politik pribadi yang kuat. Keyakinan ini mencakup preferensi ideologi,

¹⁰¹ Miftah Faridl., 'Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia.', 195." Kiai sebagai tokoh agama dan pemimpin komunitas Muslim sering kali memiliki keyakinan politik pribadi yang mempengaruhi keputusan mereka dalam partai mendukung politik tertentu. Keyakinan ini bisa didasarkan pada ideologi partai, visi politik yang sejalan dengan prinsip Islam, atau kebijakan platform yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan umat. Misalnya, kiai yang lebih konservatif cenderung mendukung partai yang menekankan nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara, sementara kiai yang lebih moderat mungkin lebih terbuka terhadap partai yang mengusung jamak. Selain faktor ideologis, hubungan pribadi juga memainkan peran penting dalam keputusan politik kiai. Mereka bisa memilih mendukung partai tertentu karena memiliki hubungan dekat dengan seorang politisi, baik karena hubungan persahabatan, kedekatan emosional, maupun rasa hormat terhadap kepemimpinan tokoh tersebut. Faktor ini membuat keputusan politik kiai sering kali bersifat subjektif dan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan pragmatis semata. Hubungan personal ini juga bisa dihapus dari sejarah interaksi antara kiai dan politisi. Misalnya, jika seorang politisi pernah membantu pesantren atau komunitas Muslim dalam aspek tertentu, kiai mungkin merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan dukungan sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun, penting bagi kiai untuk tetap menjaga keseimbangan antara hubungan pribadi dan kepentingan umat. Mereka memastikan bahwa keputusan politik yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan bukan semata-mata karena kedekatan pribadi dengan seorang politisi. Dengan demikian, kiai dapat tetap menjadi pemimpin moral yang dihormati dan dijunjung tinggi

platform politik, dan pandangan terhadap figur pemimpin partai. Keyakinan politik pribadi kiai biasanya terbentuk dari nilai-nilai keagamaan, pengalaman hidup, dan pemahaman mereka tentang kebutuhan masyarakat. Misalnya, seorang kiai yang memiliki visi untuk memperjuangkan keadilan sosial cenderung mendukung partai politik dengan platform yang mempromosikan kesejahteraan rakyat dan penghapusan ketimpangan sosial.¹⁰²

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pilihan politik kiai adalah kesesuaian ideologi partai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Partai politik yang memiliki komitmen terhadap pendidikan Islam, penguatan nilai-nilai moral, dan perlindungan terhadap umat Islam sering kali menjadi pilihan utama. Kiai melihat partai tersebut sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan umat dan melindungi nilai-nilai agama dari pengaruh yang dianggap negatif. Dukungan terhadap partai dengan kesesuaian ideologi ini tidak hanya mencerminkan keyakinan pribadi kiai, tetapi juga tanggung jawab moral mereka untuk memimpin komunitas ke arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Selain faktor ideologis, hubungan personal dengan politisi juga menjadi salah satu alasan mengapa kiai memilih partai politik tertentu. Hubungan ini bisa berupa ikatan persahabatan, hubungan profesional, atau rasa hormat yang mendalam terhadap politisi tertentu. Sebagai contoh, seorang kiai mendukung partai politik tertentu karena memiliki hubungan baik dengan salah satu tokoh utama partai tersebut, seperti pemimpin partai atau kandidat dalam pemilu. Dalam situasi ini, hubungan personal dapat menciptakan rasa kepercayaan dan solidaritas, yang mendorong kiai untuk memberikan dukungan politik mereka.

Namun, keputusan kiai yang didasarkan pada hubungan personal sering kali memicu pertanyaan tentang objektivitas mereka. Kritik terhadap keterlibatan kiai dalam politik sering kali mencuat ketika dukungan mereka dianggap lebih didasarkan pada hubungan personal daripada kepentingan

¹⁰² Fealy, Greg, 'Ulama and Politics in Indonesia: A History of Religious Authority.' *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*, Edited by Jajat Burhanuddin and Kees van Dijk. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), 247.

masyarakat luas. Untuk menjaga legitimasi mereka sebagai pemimpin moral, kiai perlu memastikan bahwa hubungan personal mereka dengan politisi tidak mengorbankan tanggung jawab mereka terhadap komunitas.

Faktor personal dan ideologis juga saling berinteraksi dalam menentukan pilihan politik kiai. Misalnya, seorang kiai yang memiliki hubungan personal dengan politisi tertentu lebih mudah menerima ideologi atau platform partai yang diusung oleh politisi tersebut. Sebaliknya, kiai yang sudah memiliki keyakinan ideologis tertentu memilih untuk menjalin hubungan dengan politisi yang sejalan dengan pandangan mereka. Interaksi antara faktor personal dan ideologis ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan politik kiai.

Di tingkat lokal, hubungan personal sering kali menjadi faktor penentu utama dalam pilihan politik kiai. Dalam komunitas kecil, hubungan antarindividu memiliki pengaruh yang besar, sehingga kiai cenderung mendukung politisi yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Hubungan ini dapat berupa kolaborasi dalam proyek-proyek komunitas, seperti pembangunan pesantren, masjid, atau program sosial lainnya. Dalam hal ini, keputusan politik kiai tidak hanya mencerminkan preferensi ideologis, tetapi juga tanggung jawab mereka untuk memperkuat hubungan sosial di komunitas mereka.¹⁰³

Di sisi lain, di tingkat nasional, faktor ideologis sering kali lebih dominan. Kiai yang terlibat dalam politik nasional cenderung lebih fokus pada isu-isu besar, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, dan hubungan internasional. Dalam situasi ini, kiai memilih partai politik berdasarkan kesesuaian antara visi mereka dengan platform yang diusung oleh partai tersebut. Misalnya, seorang kiai yang memiliki komitmen terhadap pendidikan Islam mendukung partai yang memprioritaskan anggaran untuk pendidikan agama.

Namun, faktor personal tetap memainkan peran dalam politik nasional, terutama dalam hubungan antara kiai dan elit politik. Banyak kiai

¹⁰³ Ahmad Subakir., *Relasi Kiai Dan Kekuasaan Menguk Relasi Kiai Dan Pemerintah Dalam Politik Lokal*, STAIN Kediri Press.2018.10.

memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh penting di tingkat nasional, baik melalui organisasi keagamaan, jaringan alumni pesantren, atau koneksi pribadi. Hubungan ini sering kali memengaruhi keputusan kiai dalam mendukung partai politik tertentu. Sebagai contoh, seorang kiai yang memiliki hubungan baik dengan seorang kandidat presiden mendukung partai yang mengusung kandidat tersebut.

Keputusan politik kiai yang didasarkan pada faktor personal dan ideologis juga mencerminkan upaya mereka untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin komunitas. Mereka memastikan bahwa dukungan politik mereka tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka secara pribadi, tetapi juga mendukung kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, transparansi dan komunikasi dengan komunitas menjadi kunci untuk menjaga legitimasi keputusan mereka.

b. Ranah

Membedah motivasi politik para kiai, tokoh agama yang dihormati di Jombang, bagaikan menyelami lautan makna yang kompleks. Keputusan mereka untuk mendukung partai politik tertentu didorong oleh perpaduan berbagai faktor, memadukan idealisme agama, tanggung jawab sosial, dan kalkulasi strategis.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sari, Hendro Fadli., “Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013.” *Perilaku Politik Elit & Hubungan Kyai - Santri*, 2013, 1–15.” Memahami motivasi politik para kiai di Jombang dalam mendukung partai politik tertentu memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keputusan mereka. Keputusan tersebut sering kali merupakan hasil dari kombinasi idealisme agama, tanggung jawab sosial, dan pertimbangan strategis. Sebagai pemimpin spiritual, kiai memiliki peran penting dalam membimbing komunitas mereka sesuai dengan nilai-nilai agama. Dukungan politik yang mereka berikan sering kali didasarkan pada keyakinan bahwa partai atau kandidat tertentu akan mempromosikan dan melindungi nilai-nilai tersebut. Selain itu, kiai juga merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan kesejahteraan komunitas mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mendukung partai politik yang menawarkan program atau kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Pertimbangan strategis juga memainkan peran penting, di mana kiai mungkin mendukung partai yang memiliki peluang besar untuk menang atau yang dapat memberikan keuntungan politik bagi komunitas mereka. Dengan demikian, keputusan politik kiai di Jombang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara keyakinan agama, tanggung jawab sosial, dan strategi politik.”

i. Nilai-nilai agama dan moral.

Dakwah dan peduli umat bagi banyak kiai politisi merupakan sarana untuk menyebarkan nilai-nilai agama dan moralitas. Mereka melihat partai politik sebagai platform untuk memperjuangkan keadilan sosial, memberantas kemiskinan, dan menegakkan syariat Islam sesuai pemahaman mereka. Melindungi umat kiai juga termotivasi untuk melindungi umat dari pengaruh politik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mereka khawatir akan ideologi sekuler atau kelompok ekstremis yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

ii. Tanggung jawab sosial dan kepedulian masyarakat.

Mewujudkan aspirasi umat, Kiai memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat di sekitar mereka. Mereka tergerak untuk terlibat politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, Kiai memiliki cita-cita untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral. Mereka melihat partai politik sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui kebijakan publik dan program pembangunan.¹⁰⁵

iii. Pertimbangan strategis dan pragmatis.

Memperkuat pengaruh dan posisi tawar, Kiai sadar bahwa dukungan politik mereka memiliki pengaruh yang signifikan. Mereka menggunakan pengaruh ini untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam memperjuangkan kepentingan pesantren, umat Islam, atau masyarakat luas. Menjaga kelangsungan institusi, Bagi kiai yang memimpin pesantren atau organisasi keagamaan, pertimbangan pragmatis mungkin turut berperan. Dukungan terhadap partai politik tertentu dapat membantu mereka dalam mengakses sumber daya dan menjalin hubungan dengan elit politik, yang ultimately bermanfaat bagi kelangsungan institusi yang mereka pimpin.

¹⁰⁵ Hidayat, Agus., 'Dinamika Politik Kyai Dan Pesantren Di Indonesia: Pergulatan Akses Politik Dan Transformasi Relasi Sosial Politik.', *JurnalPost*, 2022, 34.

iv. Dinamika politik lokal dan nasional.

Relasi dengan tokoh politik, Kiai sering kali menjalin hubungan dekat dengan tokoh politik lokal dan nasional. Dukungan mereka terhadap partai politik tertentu didasari oleh hubungan personal, kesepakatan ideologi, atau pertimbangan pragmatis lainnya. Kondisi politik kontemporer, Keputusan politik kiai juga dipengaruhi oleh konteks politik kontemporer. Isu-isu seperti kebangkitan Islam politik, polarisasi politik, dan potensi perlakuan diskriminatif terhadap umat Islam dapat mendorong mereka untuk mengambil sikap politik yang lebih tegas.¹⁰⁶

Penting untuk dicatat bahwa motivasi politik kiai tidak selalu seragam. Faktor-faktor yang mendorong mereka dapat bervariasi tergantung pada latar belakang individu, afiliasi pesantren, konteks lokal, dan situasi politik yang berkembang. Memahami kompleksitas motivasi ini penting untuk memahami peran politik kiai secara lebih menyeluruh dan menghindari stereotip yang keliru.

c. Modal.

Modal sosial merupakan faktor penting dalam memotivasi perilaku kiai dalam pilihan partai politik. Modal sosial ini dapat berupa: Kepercayaan social dimana kiai yang memiliki kepercayaan sosial yang tinggi di masyarakat akan lebih mudah untuk memobilisasi dukungan untuk partai politik tertentu. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui berbagai cara, seperti khutbah di masjid, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya. Jaringan social kiai yang memiliki jaringan sosial yang luas dapat memanfaatkan jaringan tersebut untuk menyebarkan informasi tentang partai politik tertentu. Jaringan ini dapat berupa organisasi keagamaan, organisasi sosial, atau organisasi lainnya.¹⁰⁷

Prestise social kiai yang memiliki prestise sosial yang tinggi akan lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Prestise ini dapat diperoleh

¹⁰⁶ Aziz, Rizky Amalia., 'Kiai Dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori Dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Di Kecamatan Tegalrejo.', 240.

¹⁰⁷ Haryanto, Agus., 'Pengaruh Modal Sosial Terhadap Partisipasi Politik Kiai.', *Urnal Politik Dan Keislaman*, 7, no. 3 (n.d.): 60.

melalui berbagai cara, seperti pendidikan agama yang tinggi, pengalaman memimpin organisasi keagamaan, atau karisma pribadi.

Selain modal sosial, faktor lain yang dapat memotivasi perilaku kiai dalam pilihan partai politik adalah, Ideologi politik, Kiai mungkin memilih partai politik yang sejalan dengan ideologi politik mereka. Kepentingan pribadi, Kiai memilih partai politik yang dapat membantu mereka mencapai tujuan pribadi mereka, seperti mendapatkan akses ke sumber daya atau kekuasaan. Tekanan eksternal, Kiai mungkin memilih partai politik karena mereka merasa tertekan oleh pihak lain, seperti pemerintah atau organisasi keagamaan.¹⁰⁸ Perlu dicatat bahwa tidak semua kiai akan termotivasi oleh faktor-faktor yang sama.¹⁰⁹ Motivasi setiap kiai mungkin berbeda-beda tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan keyakinan mereka.¹¹⁰

¹⁰⁸ Sukron Kamil, *Politik Kiai: Peran Kiai Dalam Politik Pascareformasi Di Jawa Timur* (Jakarta: Teraju, 2002), 50.

¹⁰⁹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 213.

¹¹⁰ Greg Fealy, "Ulama and Politics in Indonesia: A Historical Survey," Dalam Robert W. Hefner & Patricia Horvatich (Ed.), *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997), 140." Motivasi seorang kiai dalam mengambil keputusan, termasuk dalam ranah politik, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan latar belakang pribadi, pengalaman hidup, dan keyakinan yang mereka anut. Latar belakang meliputi lingkungan sosial, pendidikan, dan tradisi keagamaan yang membentuk pandangan mereka terhadap peran seorang kiai dalam masyarakat. Seorang kiai dari pesantren tradisional di pedesaan, misalnya, mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan kiai dari pesantren modern di perkotaan, terutama dalam hal keterlibatan politik. Pengalaman hidup juga memainkan peran penting. Kiai yang pernah mengalami tekanan dari pemerintah atau memiliki sejarah konflik dengan penguasa cenderung lebih hati-hati atau kritis dalam memilih afiliasi politik. Sebaliknya, kiai yang memiliki pengalaman positif dalam bekerja sama dengan aktor politik mungkin lebih terbuka untuk mendukung partai tertentu. Selain itu, keyakinan religius kiai menjadi landasan utama yang memandu sikap dan tindakan mereka. Pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, khususnya terkait konsep kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, memengaruhi cara mereka melihat politik. Kombinasi dari faktor-faktor ini menghasilkan keragaman motivasi di kalangan kiai, sehingga tidak dapat disamaratakan. Hal ini mencerminkan kompleksitas peran kiai sebagai pemimpin spiritual dan sosial di masyarakat.

F. Kerangka Berfikir Theory.

Mendialogkan Theory Max Weber Dan Gabriel Almond Guna Memahami Tindakan Keragaman Partai Politik Pesantren Di Jombang			
Memahami Kerangka Grand Theory menuju Middle Theory			
No	Max Weber	Gabriel Almond	Distingsi
1	Rasionalitas formal merupakan keputusan didasarkan pada perhitungan efisiensi dan kalkulasi untung dan rugi.	Budaya politik parokia bersifat individu tidak terlalu peduli dengan politik dan berfokus pada urusan pribadi.	Rasionalitas formal dan budaya politik partisipan pada Kiai pesantren menggunakan kalkulasi rasional untuk menentukan pilihan partai politik mereka, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan pada komunitas mereka.
2	Rasionalitas nilai dalam keputusan didasarkan pada keyakinan, nilai, dan ideologi.	.Budaya politik kaula merupakan Individu yang patuh pada pemimpin dan menerima keputusan mereka	Rasionalitas nilai dan budaya politik kaula, Kiai pesantren didorong oleh nilai- nilai agama dan moral mereka dalam memilih pemimpin atau partai politik yang sejalan dengan nilai tersebut, meskipun mereka tidak secara aktif terlibat dalam politik.
3	Afektif disini merupakan keputusan didasarkan pada emosi dan perasaan.	Budaya politik partisipan merupakan Individu aktif terlibat dalam politik dan menyuarakan pendapat mereka.	Afektif dan budaya politik adalah kiai pesantren dipengaruhi oleh emosi dan perasaan mereka dalam menanggapi isu-isu politik, namun mereka tidak secara terbuka menyuarakan pendapat mereka karena norma budaya yang menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap pemimpin

4	Tradisional merupakan keputusan didasarkan pada kebiasaan, norma, dan tradisi.		Tradisional dan budaya politik partisipan adalah Kiai pesantren mengikuti tradisi dan norma komunitas mereka dalam memilih pemimpin atau partai politik, namun mereka juga mungkin secara aktif terlibat dalam politik untuk melestarikan nilai-nilai dan tradisi tersebut
Analisis keragaman pilihan partai politik kiai pesantren di Jombang			
	Theory Weber dan Almond dipakek memahami kiai pesantren di Jombang yang memiliki pilihan partai politik beragam, dimana faktor-faktor seperti Rasionalitas, Nilai, Emosi, Tradisi, Dan Budaya Politik dapat memengaruhi keputusan mereka.		
Mendialogkan theory Gabriel Almond sebagai Middle Theory dengan Pierre Bourdieu guna memahami motivasi partai politik kiai dalam Applied Theory.			
Mendialogkan theory Gabriel Almond (Budaya Parokia, Budaya Politik Kaula, Dan Budaya Politik Partisipan) dengan theory Pierre Bourdieu (Habitus, Modal, Dan Arena) sebagai theory terapan dapat memberikan kerangka yang komprehensif guna memahami motivasi politik kiai.			
1	Budaya politik dan habitus	Budaya parokia pada kiai yang memiliki budaya parokia cenderung memiliki habitus yang konservatif dan terikat pada tradisi. Mereka melihat politik sebagai ranah yang terpisah dari kehidupan keagamaan dan lebih memilih untuk fokus pada peran mereka sebagai pemimpin spiritual	

		<p>Budaya politik kaula pada kiai dengan budaya politik kaula memiliki habitus yang lebih patuh dan hierarkis. Mereka lebih cenderung mengikuti arahan pemimpin politik dan ulama' senior.</p> <p>Budaya politik partisipan pada kiai dengan budaya politik partisipan memiliki habitus yang lebih aktif dan terlibat dalam politik. Mereka melihat politik sebagai cara untuk memperjuangkan nilai-nilai agama dan sosial mereka.</p>
2	Modal dan Arena Politik	<p>Modal sosial merupakan kiai memiliki modal sosial yang signifikan karena mereka dihormati oleh komunitas mereka. Modal sosial ini dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dan mempengaruhi keputusan politik.</p> <p>Modal budaya merupakan kiai juga memiliki modal budaya yang signifikan karena mereka memiliki pengetahuan dan keahlian agama yang mendalam. Modal budaya ini dapat digunakan untuk melegitimasi otoritas mereka dan mendingkat wacana politik.</p> <p>Arena politik, kiai dapat berpartisipasi dalam berbagai arena politik, termasuk pemilihan umum, demonstrasi, dan negosiasi dengan pejabat pemerintah. Arena politik ini menyediakan platform bagi kiai untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mempengaruhi kebijakan publik.</p>
3	Motivasi politik kiai	<p>Melindungi nilai-nilai agama, Kiai termotivasi untuk terlibat dalam partai politik untuk melindungi nilai-nilai agama dan moral mereka. Mereka khawatir tentang pengaruh sekulerisme atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama</p> <p>Meningkatkan kesejahteraan komunitas pada kiai termotivasi untuk terlibat dalam partai politik guna meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Mereka mencari akses ke sumber daya dan layanan pemerintah untuk membantu orang miskin dan terpinggirkan.</p>

Mendialogkan theory Almond dan Bourdieu dalam memahami motivasi politik kiai dengan cara yang lebih kompleks. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor budaya, sosial, dan politik yang memengaruhi perilaku kiai dalam politik.